



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA

LAKIP 2024

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PURWAKARTA



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sebagaimana amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja dan Peraturan Bupati Nomor 102 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan menggambarkan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tahun 2024 yang telah digariskan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024–2026 dan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024–2026.

LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini diharapkan Organisasi Dinas Kesehatan senantiasa melakukan perbaikan dalam upaya penyelenggaraan *good governance* dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada Dinas Kesehatan tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta



Nomor 700.1.2.1/538/Inspt-Irban IV/2024 tanggal 26 April 2024, dimana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta telah diimplementasikan dengan hasil evaluasi sebesar 74,85 (dengan kategori BB (Sangat Baik)). Hal ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 80,95 (dengan kategori A- Memuaskan) dan tahun 2021 sebesar 80,55 (dengan kategori A- Memuaskan).

Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta secara umum telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dan dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2024, dimana telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran tujuan strategis, 4 sasaran utama dan 46 indikator sasaran program sehingga secara keseluruhan terdapat 50 indikator yang diukur. Berdasarkan hasil evaluasi dari capaian kinerja tujuan dan sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian sangat tinggi, dimana hanya satu indikator yang dibawah 100% yaitu cakupan indeks pencapaian SPM Kesehatan dengan capaian sebesar 92,90%. Berdasarkan capaian indikator Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat menunjukkan 11 indikator diatas target, 6 indikator mencapai target, 8 indikator diatas 90%, 6 indikator antara 80-90%, 2 indikator antara 70-80% dan 2 indikator tidak ada datanya karena tidak ada anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut yang perlu dilakukan melalui survey. Indikator Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan menunjukkan hanya 2 indikator yang tidak mencapai



dengan capaian 88,24% dan 97,53%. Indikator Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan menunjukkan kedua indikator telah mencapai 100% dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan menunjukkan juga semuanya telah mencapai target 100%. Sedangkan 1 indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota masih menunggu hasil final dari review SAKIP Dinas Kesehatan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Melalui tujuan organisasi yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan strategi meningkatkan umur harapan hidup yang sehat dan produktif sehingga dapat mendukung meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat untuk mewujudkan Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah. Dimana diharapkan setiap penduduk di Kabupaten Purwakarta diarahkan pada upaya meningkatkan Akseibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang merata, terjangkau dan berkeadilan dengan strategi meningkatkan Ketersediaan Kualitas Pemenuhan Tenaga Kesehatan, Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Kualitas Kesehatan Lingkungan serta pemberdayaan Masyarakat dalam bidang kesehatan. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula peran swasta dan kelompok potensial di tingkat masyarakat agar berperan secara aktif dalam penyelesaian masalah-masalah kesehatan sesuai bidangnya masing-masing sebagai wujud menuju kemandirian masyarakat di bidang pelayanan kesehatan.

Upaya-upaya pelayanan kesehatan pada tahun mendatang harus tetap diupayakan Sosialisasi dan pemahaman serta pembagian tugas yang jelas untuk pengukuran kinerja yang



ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang mencakup semua pegawai, pemantauan dan penilaian terhadap pelaporan kinerja yang disampaikan secara berjenjang dan berkala sesuai dengan tujuan organisasi, pengukuran kinerja harus bisa disinergikan dengan program baik lokal, regional dan nasional serta dikaitkan dengan penilaian kinerja pegawai sehingga dapat memudahkan dalam penilaian pegawai maupun capaian organisasi, pimpinan pada unit bidang, sekretariat maupun UPTD melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja bidang/sekretariat maupun UPTD serta melaporkan kepada Kepala Dinas melalui sekretaris serta pimpinan melakukan agenda pertemuan secara berkala untuk memantau, mengevaluasi serta mengendalikan terhadap capaian kinerja organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen untuk menginformasikan pertanggung jawaban kinerja yang telah dilakukan Dinas Kesehatan selama tahun 2024, sebagai komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan Dinas Kesehatan.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kesehatan Kabupaten Purwakarta tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi dan pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

Purwakarta, Februari 2025

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA,**

dr. H. Deni Darmawan, MARS
NIP. 197509132006041008



DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Dasar Hukum	I - 2
1.3. Kewenangan Pemerintah Daerah	I - 5
1.4. Aspek Strategis Organisasi	I - 7
1.5. Struktur Organisasi	I - 10
1.6. Sistematika	I - 15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II - 1
2.1. Visi dan Misi Pemerintah Daerah dan Tujuan Dinas Kesehatan	II - 1
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan	II - 3
2.3. Rencana Kerja	II - 5
2.3. Penetapan Kinerja	II - 5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III - 1
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	III - 3
3.2. Realisasi Anggaran	III - 87
BAB IV PENUTUP	IV - 1
DAFTAR LAMPIRAN	xi



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II-6
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Secara Cascading di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2024	II-9
Tabel.3.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja	III-3
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2024	III-4
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2023-2024	III-5
Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPD dan Renstra Tahun 2026	III-7
Tabel 3.5 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Sampai Dengan Triwulan IV Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	III-10
Tabel 3.6 Standar Kategori Penilaian IKM	III-12
Tabel 3.7 Tren Nilai IKM dari Dinkes, Puskesmas, Labkesda dan UTD PMI Tahun 2022 s/d 2024	III-13
Table 3.8 Tren Kategori Nilai IKM Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2024	III-14
Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Dinas Kesehatan Tahun 2024	III-17
Tabel 3.10 Analisis Efisiensi terhadap Sumber Daya Di Dinas Kesehatan Berdasarkan Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2024	III-20
Tabel 3.11 Analisis Keberhasilan, Kegagalan Program Dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024 ..	III-23
Tabel 3.12 Pengukuran Pencapaian Sasaran Program Dinas Kesehatan Tahun 2024	III-33
Tabel 3.13 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 2024 ...	III-39
Tabel 3.14 Capaian Perbandingan Kinerja Tahun 2023 Dan 2024	III-44



Tabel 3.15	Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten Kota Lain	III-50
Tabel 3.16	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Tahun 2024	III-54
Tabel 3.17	Analisis Efisiensi terhadap Sumber Daya Di Dinas Kesehatan berdasarkan Indikator Program Tahun 2024	III-67
Tabel 3.18	Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Program Dan Kegiatan	III-70
Tabel 3.19	Penghargaan/Prestasi Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024	III-85
Tabel 3.20	Rincian Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2024	III-88
Tabel 3.21	Rincian Realisasi Anggaran Per UPTD Puskesmas Tahun 2024	III-101
Tabel 3.22	Rincian Realisasi Anggaran UPTD Puskesmas Per Sub Kegiatan Tahun 2024	III-102
Tabel 3.23	Rincian Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2024	III-104



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1 Rata-Rata Capaian SPM di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	III-8
Grafik 3.2 Perbandingan Capaian SPM dengan Kabupaten Wilayah Perbatasan Tahun 2022-2024	III-12



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	Halaman I-14
------------	---	-----------------



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju 2025 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta
- Lampiran 2 : Perubahan IKU Dinas Kesehatan 2024-2026
- Lampiran 3 : Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan oleh melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kesehatan selaku pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Kesehatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintah daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Laporan kinerja Dinas Kesehatan merupakan tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program, kebijakan, dan pengembangan kesehatan masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat



menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu Lembaga. Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta sebagai organisasi perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati Kabupaten Purwakarta. Tujuan penyampaian laporan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta sebagai perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran Dinas Kesehatan berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2024-2026. Selain itu penyusunan laporan kinerja ini dijadikan sebagai *feedback* untuk memperbaiki kinerja Dinas Kesehatan pada tahun berikutnya.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);



- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- g. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - o. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kimerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - q. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan



- Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
- s. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 2A Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 2A);
 - t. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 56 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 56);
 - u. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.
 - v. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 54 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
 - w. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
 - x. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 102 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 102);

1.3 KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Arah Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dengan mengacu kepada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai pengganti Permendagri Nomor 13 Tahun 2006



tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terbagi atas urusan wajib dan urusan pilihan. Khusus dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. Urusan Wajib dan Urusan Pilihan terbagi kedalam kelompok urusan utama dan urusan pendukung. Urusan utama diartikan sebagai urusan pemerintahan yang menopang langsung terhadap upaya pencapaian Visi, Misi, dan 9 (Sembilan) Langkah menuju Purwakarta Digjaya, sedangkan Urusan Pendukung merupakan urusan pemerintahan yang mendukung upaya pencapaian Visi, Misi, dan 9 (Sembilan) Langkah Mewujudkan **“Purwakarta Cerdas, Sehat, dan Berakhlakul Karimah”**, dimana tema pembangunan daerah untuk tahun 2024 yaitu **“Meningkatkan Pemulihan Ekonomi dan Daya Saing Daerah”**.

Adapun Program Prioritas Pembangunan untuk tahun 2024, yakni:

- a. Peningkatan kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan
- b. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB
- c. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- d. Pengembangan koperasi dan UMKM
- e. Peningkatan nilai investasi, usaha industry dan perdagangan
- f. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat
- g. Peningkatan produksi pangan, pertanian, dan perikanan
- h. Penanganan sosial masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- i. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur dasar di semua wilayah
- j. Reformasi birokrasi dan pelayanan public
- k. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa
- l. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat



Sedangkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 diprioritaskan pada:

- a. Peningkatan kualitas SDM
- b. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan KB
- c. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- d. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah
- e. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat
- f. Peningkatan infrastruktur daerah
- g. Reformasi birokrasi
- h. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa serta penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dengan memperhatikan arah kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan sesuai dengan fungsi Dinas Kesehatan dan kewenangan yang ada, kebijakan peningkatan derajat kesehatan dimana kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar.

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Pada dasarnya masalah kesehatan bersifat kompleks, tidak berdiri sendiri dan mempunyai keterkaitan sehingga tidak dapat diselesaikan sendiri oleh dinas kesehatan. Untuk itu diperlukan kerjasama yang harus dilakukan secara lintas sektoral. Program yang mempunyai keterkaitan dengan kegiatan lintas OPD merupakan kegiatan yang dilakukan bersama OPD lain, kegiatan yang mempunyai dampak terhadap kesehatan, dan kegiatan yang bersifat lintas batas dalam bidang kesehatan.

Kegiatan tersebut meliputi kegiatan lintas OPD, kerjasama dengan LSM/pihak swasta dan pemerintah antar kabupaten/kota, propinsi dan pusat, antara lain Bapperida, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Pengendalian



Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda, PKK, Rumah Sakit, dan BPJS Kesehatan,) dan asuransi kesehatan lainnya dan sarana pelayanan kesehatan swasta.

Isu dan aspek strategis permasalahan kesehatan diantaranya:

- a. Masalah pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan rujukan
- b. Masalah jaminan kesehatan masyarakat atau jaminan kesehatan daerah
- c. Masalah kesehatan pengembangan serta upaya kesehatan lainnya termasuk kesehatan lintas batas
- d. Masalah gizi masyarakat meliputi: stunting dan penanganan gizi buruk, ketahanan pangan, pemanfaatan bahan pangan setempat, peningkatan gizi keluarga dan menu seimbang, peningkatan dan penguatan posyandu, lomba balita dan intervensi keluarga miskin dan balita di bawah garis merah (gizi buruk dan gizi kurang), penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), kekurangan Vitamin A (KVA), kekurangan energi kronis (KEK), kesehatan gizi remaja dan wanita pekerja serta ibu hamil dan melahirkan
- e. Masalah promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat meliputi: penyebaran informasi kesehatan, pemanfaatan teknologi informasi dan pengembangan media penyuluhan dengan berbagai media dan pembinaan/pemberdayaan masyarakat melalui bina suasana, percontohan Kawasan sehat, gerakan perilaku hidup bersih dan sehat, pemberian penghargaan kepada kader kesehatan teladan, keluarga teladan, tokoh masyarakat, stake holder maupun media yang mendukung dan berperan dalam pengembangan dan pembangunan kesehatan



- f. Masalah penyehatan lingkungan dan sanitasi meliputi: penanganan limbah industri, pencegahan, penanganan dan penanggulangan pencemaran, penyediaan air bersih pedesaan dan perkotaan, penanganan limbah medis, penanganan sampah, penyehatan lingkungan dan pemukiman, penyehatan tempat-tempat umum, industri dan pengelolaan makanan
- g. Masalah penanggulangan penyakit meliputi: penanganan penyakit bersumber binatang, penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit dan Bencana Alam, penanganan pasien dan isolasi penyakit di sarana pelayanan, pencegahan dan pengamatan penyakit di masyarakat dan sarana pelayanan kesehatan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu/miskin, anak jalanan, terlantar dan gelandangan
- h. Masalah kemitraan pelayanan kesehatan meliputi : kerjasama kesehatan dengan lintas sektor dan profesi, penguatan kemitraan dengan stakeholder dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), kemitraan dengan perusahaan swasta melalui CSR, kesehatan anak balita di institusi kesehatan, pendidikan, dan institusi lainnya termasuk masyarakat dan kesehatan lansia di institusi kesehatan, pendidikan, dan institusi lainnya termasuk masyarakat
- i. Masalah manajemen dan kebijakan kesehatan meliputi: penyelarasan pembangunan kesehatan dan daerah dan peningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan melalui pelatihan, kursus, ijin belajar dan tugas belajar.
- j. Pemenuhan sarana prasarana serta sumber daya kesehatan, termasuk distribusi dan pemetaan pegawai, pemenuhan sementara dengan tenaga Non PNS, pengajuan dan optimalisasi DAK dan sumber anggaran lainnya dalam upaya memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang optimal untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan.



1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, dimana berdasarkan pasal 2 huruf (d) nomor (2); Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 30 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, dimana pasal 3 ayat (1) menyatakan; Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) dimana Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 30 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, dimana pasal 5 ayat (2) menyatakan;

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;



- d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang kesehatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan urusan kesehatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan diuraikan pada pasal pasal 5 ayat (3) yaitu;

Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, meliputi sub Urusan Pemerintahan:

- a. Upaya kesehatan, yang terdiri atas:
 - 1) Pengelolaan usaha kesehatan perorangan Daerah Kabupaten dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten;
 - 2) Pengelolaan usaha kesehatan masyarakat (UKM) Daerah Kabupaten dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten; dan
 - 3) Pemberian rekomendasi penerbitan izin rumah sakit kelas C dan kelas D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah.
- b. Sumber daya manusia kesehatan, yang terdiri atas:
 - 1) Pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan; dan
 - 2) Perencanaan dan pengembangan sdm kesehatan untuk UKM dan UKP daerah kabupaten
- c. Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan/ minuman, yang terdiri atas:
 - 1) Pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;
 - 2) Pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT);



- 3) Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga;
 - 4) Pemberian rekomendasi atas penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga; dan
 - 5) Pengawasan pascapasar (*post-market*) produk makanan dan minuman industri rumah tangga.
- d. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta pada Pasal 4 maka Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagai berikut:

- a. Kepala:
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Keuangan, Akunting dan Aset; dan
 - 2) Subbagian Kepegawaian, Umum dan Hukum;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas di Dinas Kesehatan, terbagi dalam dua jenis meliputi ;



- 1) UPTD pelaksana kegiatan teknis operasional, yang dalam hal ini adalah Puskesmas sebanyak 20 puskesmas, diantaranya:
 - a) Puskesmas Bojong
 - b) Puskesmas Bungursari
 - c) Puskesmas Campaka
 - d) Puskesmas Cibatu
 - e) Puskesmas Darangdan
 - f) Puskesmas Jatiluhur
 - g) Puskesmas Koncara
 - h) Puskesmas Kiarapedes
 - i) Puskesmas Munjuljaya
 - j) Puskesmas Marancang
 - k) Puskesmas Mulyamekar
 - l) Puskesmas Maniis
 - m) Puskesmas Purwakarta
 - n) Puskesmas Pondoksalam
 - o) Puskesmas Plered
 - p) Puskesmas Pasawahan
 - q) Puskesmas Sukatani
 - r) Puskesmas Sukasari
 - s) Puskesmas Tegalwaru
 - t) Puskesmas Wanayasa
 - 2) UPTD pelaksana kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - a) Laboratorium Kesehatan;
 - b) Perbekalan Kesehatan.
- f. Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta yang termuat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 30 Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut



1.6 SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai Perencanaan Strategis (Visi dan Misi), Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, Strategi, Program dan Kegiatan, Perjanjian Kinerja dan Renja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Ortanisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI PEMERINTAH DAERAH DAN TUJUAN DINAS KESEHATAN

Berdasarkan visi misi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005–2025 disebutkan visi dan misi tujuan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Visi : **Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah**

Misi

1. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah.
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal
4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

Berdasarkan visi misi dan tujuan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 terkait dengan Dinas Kesehatan yaitu;



Visi : **Purwakarta Cerdas, Sehat dan Berakhlakul Karimah**

Misi II : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan 2.2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran 3 : Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Strategi : Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Misi V : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

Tujuan 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel

Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana pada pasal 13 menyatakan Rensta Perangkat Daerah memuat memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan



pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dengan memperhatikan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dan RPD Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026, maka tujuan yang dicapai oleh Dinas Kesehatan merupakan sasaran pada RPD yaitu: “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat” dengan indikator yang ingin dicapai yaitu meningkatnya umur harapan hidup menjadi 71,51 tahun pada tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta.

2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Strategi

Dalam arah kebijakan yang tercantum dalam kertas Kerja RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 maka strategi dan arah kebijakan tercantum dalam 2 (dua) strategi sebagai berikut:

Strategi : Meningkatkan Upaya Pemenuhan Pelayanan Kesehatan
Arah Kebijakan :

1. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Upaya dicapai melalui :

1. Meningkatkan pemenuhan mutu pelayanan kesehatan dan kapasitas tenaga kesehatan
2. Memperluas jaminan kesehatan masyarakat secara merata menuju UHC
3. Menurunkan angka stunting dan AKI-AKB serta penyakit menular lainnya
4. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan
5. Meningkatkan pemberdayaan dan penyuluhan pola hidup sehat masyarakat



2. Strategi: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Arah Kebijakan : Reformasi Birokrasi yaitu :

1. Meningkatkan capaian akuntabilitas perangkat daerah

Upaya dicapai melalui penguatan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja instansi dan pengendalian risiko terhadap kinerja instansi organisasi Dinas Kesehatan.

Dalam mendukung upaya tersebut, maka untuk mencapai strategi dan arah kebijakan tersebut Dinas Kesehatan merumuskan dalam tahapan strategi sebagai berikut:

- 1) Pembangunan puskesmas rawat inap secara bertahap.
- 2) Penguatan fungsi puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama.
- 3) Pengembangan upaya pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
- 4) Perlindungan kesehatan kepada masyarakat melalui upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.
- 5) Peningkatan kualitas daya dukung lingkungan.
- 6) Peningkatan kapasitas tenaga dan sarana pelayanan Kesehatan.
- 7) Pemberdayaan masyarakat dan dukungan stake holder dan lintas sektor, melalui peningkatan peran serta masyarakat menuju kemandirian dalam bidang kesehatan, penguatan perilaku hidup bersih dan sehat serta dukungan desa siaga sehat.
- 8) Pengembangan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
- 9) Penyusunan perencanaan, kajian dan regulasi pembangunan kesehatan berdasarkan masalah dan potensi



daerah, isu strategis dan kebijakan pembangunan baik global, nasional, regional maupun lokal kabupaten.

2.3 RENCANA KERJA

Dengan memperhatikan RPJPD, RPD, dan RPD Dinas Kesehatan dan mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta menetapkan Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan program Kesehatan seperti terlampir dalam lampiran 2.3 (Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta).

2.4. PENETAPAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tahun 2024 merupakan pernyataan komitmen yang mempersentasikan tekad dan janji untuk mencapai Kinerja yang jelas dan terukur dalam rangka mewujudkan target kinerja. Dalam dokumen penetapan kinerja tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam Renstra yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2023, Program-program dan kegiatan serta anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran dalam upaya pencapaian Visi dan Misi organisasi yang selengkapnya dapat dilihat pada Tabel Dokumen Perjanjian Perubahan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tahun 2024.



**Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Tujuan			
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	71,51
B	Sasaran utama			
	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	1 Umur Harapan Hidup	Tahun	71.51
		2 Cakupan Indeks Pencapaian (IP) SPM Kesehatan	%	100
C	Tujuan			
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
		2 Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik
D	Sasaran utama			
	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
		2 Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik
E	Program :			
1.	Meningkatnya pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	%	50
		2 Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100
		3 Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100
		4 Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	%	100
		5 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	100
		6 Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan standar	%	100
		7 Persentase Orang Usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	100
		8 Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke atas	%	100



No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		
		9 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	80
		10 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100
		11 Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	%	100
		12 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	95
		13 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	80
		14 Rasio posyandu per satuan balita	poin	17
		15 Cakupan kompilkasi kebidanan yang ditangani	%	100
		16 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100
		17 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100
		18 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100
		19 Persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak	%	100
		20 Non polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	100
		21 Cakupan balita pnumenia yang ditangani	%	70
		22 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	90
		23 Tingkat prevaesnsi tuberkolosis (per 100.000 penduduk)	poin	246



No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		24 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (Per 100.000 penduduk)	%	2.58
		25 Proposi jumlah kasus Tuberkulosis yang terditeksi dalam program DOTS	%	90
		26 Proposi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	90
		27 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100
		28 Cakupan penderita diare yang ditangani	%	85
		29 Cakupan penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir	%	100
		30 Proposi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	80
		31 Cakupan kunjungan bayi	%	100
		32 Cakupan Puskesmas	%	100
		33 Cakupan pelayanan nifas	%	100
		34 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100
		35 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana Kesehatan (RS)	%	100
2	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Pemenuhan minimal 9 jenis tenaga Kesehatan	%	85
		2 Persentase ijin praktik tenaga Kesehatan yang diterbitkan	%	80
		3 Persentase kebutuhan tenaga sesuai standar	%	75
		4 Persentase distribusi tenaga Kesehatan sesuai standar kebutuhan	%	78
		5 Rasio dokter per satuan penduduk	Poin	30
		6 Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Poin	30
3	Meningkatnya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1 Persentase ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan	%	100
		2 Cakupan sarana farmasi yang dibina	%	80
4	Meningkatnya Pemberdayaan	1 Persentase tingkat pembinaan/sosialisasi	%	6



No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Masyarakat Bidang Kesehatan	masyarakat dibidang Kesehatan		
		2 Persentase pembinaan kader/Lembaga Kesehatan masyarakat yang dibina	%	89
5	Meningkatnya pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	%	A

Penetapan kinerja secara berjenjang (cascading) sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Secara Cascading di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2024

No	Sasaran strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Tapkin
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
I	Kepala Dinas					
A	Tujuan					
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Umur Harapan Hidup	Tahun	71,51	Kadis Kesehatan dan KDH
B	Sasaran utama					
	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	1	Umur Harapan Hidup	Tahun	71.51	
		2	Cakupan Indeks Pencapaian (IP) SPM Kesehatan	%	100	
C	Tujuan					
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	Kadis Kesehatan dan KDH
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	
D	Sasaran utama					
	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan	1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	



No	Sasaran strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Tapkin
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemerintahan Daerah					
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	
C	Sasaran Program					
II	Sekretaris					
1.	Meningkatnya pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Cakupan Puskesmas	%	100	Semua Kepala Bidang dan Sekretaris dengan Kadis
2	Meningkatnya pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Poin	A	Sekretaris dengan Kadis
D	Sasaran Kegiatan					
II.1	Kepala Sub Bagian Keuangan, Akunting dan Aset					
1	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan	1	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	Kepala Sub Bagian Keuangan, Akunting dan Aset dengan Sekretaris
II.1	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Hukum					
1.	Meningkatnya kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Terlaksananya kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Hukum dengan Sekretaris
2.	Meningkatnya kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Hukum dengan Sekretaris
3.	Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Hukum dengan Sekretaris
4.	Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Hukum dengan Sekretaris



No	Sasaran strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Tapkin
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Hukum dengan Sekretaris
6.	Meningkatnya kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Hukum dengan Sekretaris
III	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat					
1.	Meningkatnya pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100	Kepala Bidang Kesmas dengan Kadis
		2	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	Kepala Bidang Kesmas dengan Kadis
		3	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	%	100	Kepala Bidang Kesmas dengan Kadis
		4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	100	Kepala Bidang Kesmas dengan Kadis
		5	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan standar	%	100	Kepala Bidang Kesmas dengan Kadis
		6	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	Kepala Bidang Kesmas dengan Kadis
		7	Rasio posyandu per satuan balita	poin	17	Kepala Bidang Kesmas dengan Kadis
		8	Cakupan kompilkasi kebidanan yang ditangani	%	100	Kepala Bidang Kesmas dengan Kadis



No	Sasaran strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Tapkin
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		9	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	Kepala Bidang Kesmas dengan Kadis
		10	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	Kepala Bidang Kesmas dengan Kadis
		11	Cakupan kunjungan bayi	%	100	Kepala Bidang Kesmas dengan Kadis
		12	Cakupan Puskesmas	%	100	Semua Kepala Bidang dan Sekretaris
		13	Cakupan pelayanan nifas	%	100	Kepala Bidang Kesmas dengan Kadis
		14	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	Kepala Bidang Kesmas dengan Kadis
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1	Persentase tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang Kesehatan	%	6	Kepala Bidang Kesmas dengan Kadis
		2	Persentase pembinaan kader/Lembaga Kesehatan masyarakat yang dibina	%	89	Kepala Bidang Kesmas dengan Kadis
IV	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					
1.	Meningkatnya pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	100	Kepala Bidang P2P dengan Kadis
		2	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	80	Kepala Bidang P2P dengan Kadis
		3	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100	Kepala Bidang P2P dengan Kadis



No	Sasaran strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Tapkin
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		4	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	Kepala Bidang P2P dengan Kadis
		5	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	95	Kepala Bidang P2P dengan Kadis
		6	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	80	Kepala Bidang P2P dengan Kadis
		7	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	Kepala Bidang P2P dengan Kadis
		8	Persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak	%	100	Kepala Bidang P2P dengan Kadis
		9	Non polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	100	Kepala Bidang P2P dengan Kadis
		10	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	70	Kepala Bidang P2P dengan Kadis
		11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	90	Kepala Bidang P2P dengan Kadis
		12	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	246	Kepala Bidang P2P dengan Kadis
		13	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (Per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	2.58	Kepala Bidang P2P dengan Kadis
		14	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	90	Kepala Bidang P2P dengan Kadis
		15	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	90	Kepala Bidang P2P dengan Kadis
		16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	Kepala Bidang P2P dengan Kadis



No	Sasaran strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Tapkin
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		17	Cakupan penderita diare yang ditangani	%	85	Kepala Bidang P2P dengan Kadis
		18	Cakupan penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir	%	100	Kepala Bidang P2P dengan Kadis
		19	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	80	Kepala Bidang P2P dengan Kadis
		20	Cakupan Puskesmas	%	100	Semua Kepala Bidang dan Sekretaris dengan Kadis
V	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan					
1.	Meningkatnya pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	%	50	Kepala Bidang Yankes dengan Kadis
2		Cakupan Puskesmas	%	100	Semua Kepala Bidang dan Sekretaris dengan Kadis	
3		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana Kesehatan (RS)	%	100	Kepala Bidang Yankes dengan Kadis	
VI	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan					
1.	Meningkatnya pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Cakupan Puskesmas	%	100	Semua Kepala Bidang dan Sekretaris dengan Kadis
2	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Pemenuhan minimal 9 jenis tenaga Kesehatan	%	85	Kepala Bidang SDK dengan Kadis
2		Persentase ijin praktik tenaga Kesehatan yang diterbitkan	%	80	Kepala Bidang SDK dengan Kadis	
3		Persentase kebutuhan tenaga sesuai standar	%	75	Kepala Bidang SDK dengan Kadis	
4		Persentase distribusi tenaga Kesehatan sesuai standar kebutuhan	%	78	Kepala Bidang SDK dengan Kadis	



No	Sasaran strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Tapkin
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		5	Rasio dokter per satuan penduduk	Poin	30	Kepala Bidang SDK dengan Kadis
		6	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Poin	30	Kepala Bidang SDK dengan Kadis
3	Meningkatnya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1	Persentase ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan	%	100	Kepala Bidang SDK dengan Kadis
		2	Cakupan sarana farmasi yang dibina	%	80	Kepala Bidang SDK dengan Kadis

Berdasarkan penetapan kinerja (tapkin) secara cascading menunjukkan sasaran tujuan dan sasaran strategis/utama merupakan tapkin kepala dinas dengan Kepala Daerah/ Bupati Purwakarta. Sedangkan sasaran program merupakan tapkin sekretaris dan para kepala bidang dengan kepala dinas. Dan sasaran kegiatan merupakan tapkin Kasubag Keuangan, Akunting dan Aset dengan sekretaris serta tapkin Kasubag Keuangan, Akunting dan Aset dengan sekretaris.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini disusun dalam rangka menyajikan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta selama tahun 2024 sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja dan Peraturan Bupati Nomor 102 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Isi dari LAKIP merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Kesehatan di masa mendatang.

Sistem pengukuran kinerja yang disajikan dalam LAKIP dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator kegiatan sampai kepada sasaran sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu :



1. Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang baik laporan kegiatan rutin meliputi bulanan, triwulan, semester dan laporan kegiatan lainnya yang dapat digunakan untuk pengumpulan data kinerja.
2. Data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan,

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen penetapan kinerja yang memuat indikator sasaran beserta kemampuan sumber dana yang dimiliki selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja sehingga diharapkan pengukuran kinerja tersebut dapat menggambarkan kinerja secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.

Pengukuran kinerja selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Kesehatan tahun 2024-2026.

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran berdasarkan dokumen penetapan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta yang telah ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2024.

Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta selama tahun 2024.

**Tabel.3.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91%-100%	Sangat Tinggi
2	76%-90%	Tinggi
3	66%-75%	Sedang
4	51%-65%	Rendah
5	≤50%	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada Dinas Kesehatan tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 700.1.2.1/538/Inspt-Irban IV/2024 tanggal 26 April 2024, dimana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta telah diimplementasikan dengan hasil evaluasi sebesar 74,85 dengan kategori BB (Sangat Baik). Hal ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 80,95 (dengan kategori A-



Memuaskan) dan tahun 2021 sebesar 80,55 (dengan kategori A-Memuaskan).

Tahun 2024 adalah tahun pertama implementasi RPD Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta periode 2024-2026. Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis tahun 2024:

Tujuan dan Sasaran Utama:

Adapun tujuan Dinas Kesehatan sesuai dengan RPD Dinas Kesehatan dan RPD Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 yaitu :

“Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan RPD Dinas Kesehatan dan RPD Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 yaitu :

“Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan”

Hasil capaian tujuan dan sasaran pada RPD sebagaimana pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Dinas Kesehatan Tahun 2024**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisa si	Capaian	Kategori	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Tujuan :							
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur harapan hidup	71,51	71,51	100	Sangat Tinggi	Laporan Monev Dinas	Data Final menunggu Rilis BPS
B	Sasaran :							
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Umur Harapan Hidup	71,51	71,51	100	Sangat Tinggi	Laporan Monev Dinas	Data Final menunggu Rilis BPS
		Cakupan Indeks Pencapaian (IP) SPM Kesehatan	100	92,90	92,90	Sangat Tinggi	Laporan Monev Dinas	
C	Tujuan							



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisa si	Capaian	Kategori	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A*	100	Sangat Tinggi	Laporan Monev Dinas	Data Final menunggu Review inspektorat
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	83,93	100	Sangat Tinggi	Laporan Monev Dinas	
D	Sasaran							
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara an Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A*	100	Sangat Tinggi	Laporan Monev Dinas	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	83,93	100	Sangat Tinggi	Laporan Monev Dinas	

Berdasarkan capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan capaian sangat tinggi, dimana hanya satu indikator yang dibawah 100% yaitu cakupan indeks pencapaian SPM Kesehatan dengan capaian sebesar 92,90%. Indikator pada tujuan dan sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang tercantum pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026.

Sedangkan berdasarkan perbandingan tahun 2023 menunjukkan peningkatan sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan
Tahun 2023- 2024**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Tujuan :							
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur harapan hidup	71,24	71,78	100,76	71,51	71,51	100



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
B	Sasaran :							
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Umur Harapan Hidup	71,24	71,78	100,76	71,51	71,51	100
		Cakupan Indeks Pencapaian (IP) SPM Kesehatan	100	94,55	94,55	100	92,90	92,90
C	TUJUAN							
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	BB	88.89	A	A*	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	81,86	100	Baik	83,93	100
D	SASARAN							
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	BB	88.89	A	A*	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	81,86	100	Baik	83,93	100

Berdasarkan kemajuan strategis tahun 2024 terhadap target akhir RPD Tahun 2024-2026 dan RPD Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 menunjukkan peningkatan sebagaimana tabel dibawah ini:



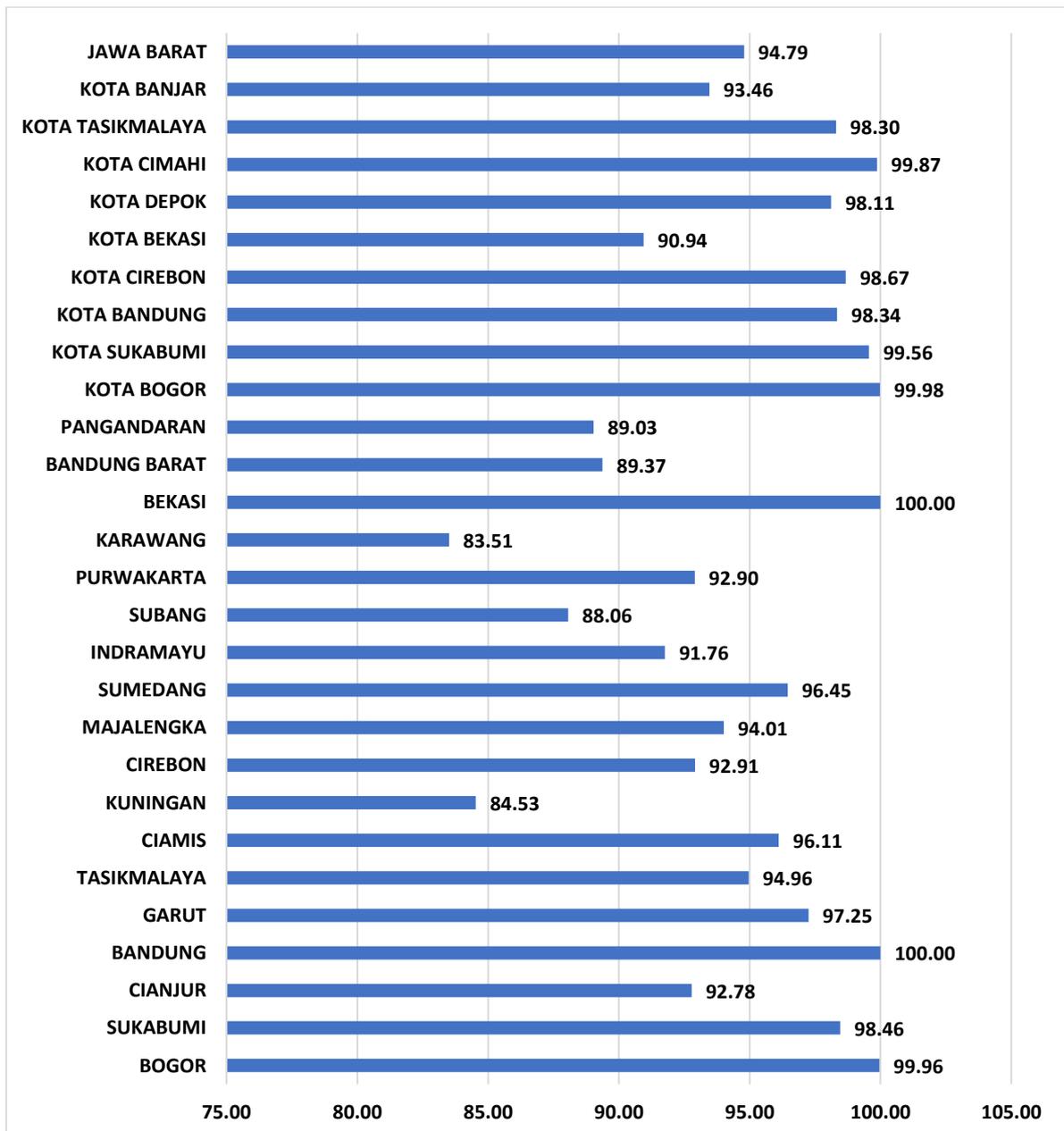
Tabel 3.4
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Dinas Kesehatan
Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPD Tahun 2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir RPD 2026	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)/(5)*100
A	Tujuan :				
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur harapan hidup	71,51	71,73	99,69
B	Sasaran :				
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Umur Harapan Hidup	71,51	71,73	99,69
		Cakupan Indeks Pencapaian (IP) SPM Kesehatan	92,90	100	92,90
C	Tujuan				
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A*	A	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83,93	Baik	100
D	Sasaran				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A*	A	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83,93	Baik	100



Untuk capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan Kabupaten Purwakarta dibandingkan dengan provinsi dan kabupaten sekitar maupun kabupaten/kota se-Jawa Barat adalah sebagai berikut:

**Grafik 3.1
Rata-Rata Capaian SPM di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024**



Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, komdat.kemkes.go.id dan spm.bangda.kemdagri (data diolah) 2024



Berdasarkan cakupan SPM, maka Kabupaten Purwakarta berada pada angka 92,90, menunjukkan dibawah rata-rata Jawa Barat sebesar 94,79 dan berada pada urutan kesembilan belas dari 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Hal ini menjadi tantangan dan perlu upaya kerja keras setidaknya mencapai rata-rata Jawa Barat dan harapannya dapat mencapai 100% semua penduduk terlayani SPM. Namun jika dibandingkan dengan wilayah perbatasan dengan Kabupaten Subang sebesar 88,06% Karawang sebesar 83,51% Cianjur sebesar 92,78 dan Kabupaten Bandung Barat sebesar 89,37% menunjukkan Kabupaten Purwakarta masih berada diatas Kabupaten tersebut.

Adapun Kabupaten/Kota dengan capaian tertinggi Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bandung (100%) dan terendah Kabupaten Karawang (83,51%). Sedangkan capaian secara rinci antar kabupaten/kota se-Jawa Barat sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.5
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota
Sampai Dengan Triwulan IV Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

REKAPITULASI CAPAIAN SPM														
NO.	KABUPATEN/KOTA	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		CAPAIAN SPM TW4	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)
1	KAB BOGOR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	KAB SUKABUMI	98.46	97.69	97.80	98.82	99.18	99.52	94.24	99.12	98.09	99.04	100.00	99.23	98.85
3	KAB CIANJUR	92.78	89.37	90.25	93.92	98.89	99.94	86.03	93.13	100.00	100.00	85.63	99.90	76.26
4	KAB BANDUNG	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5	KAB GARUT	97.25	90.93	89.14	94.50	96.05	98.85	100.00	97.60	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6	KAB TASIKMALAYA	94.96	94.79	94.96	95.08	96.84	95.44	97.67	93.76	92.86	96.24	94.94	95.72	91.23
7	KAB CIAMIS	96.11	97.41	92.23	97.25	97.64	97.01	96.07	98.17	97.71	92.67	95.49	98.35	93.30
8	KAB KUNINGAN	84.53	69.15	74.39	78.02	83.16	96.39	84.57	92.44	87.51	84.23	97.29	86.64	80.55
9	KAB CIREBON	92.91	95.64	92.22	94.56	98.57	92.71	95.37	89.53	96.84	97.53	94.58	72.37	95.02
10	KAB MAJALENGKA	94.01	84.48	84.93	88.58	95.17	100.00	88.67	89.87	100.00	100.00	97.78	98.67	100.00
11	KAB SUMEDANG	96.45	94.43	99.97	97.91	95.96	100.00	82.11	100.00	87.19	100.00	100.00	100.00	99.84
12	KAB INDRAMAYU	91.76	87.03	89.75	89.51	87.04	99.87	95.10	87.66	95.93	98.21	94.69	87.84	89.51
13	KAB SUBANG	88.06	92.67	89.94	91.52	98.60	97.87	47.47	72.98	84.42	91.52	89.73	100.00	100.00
14	KAB PURWAKARTA	92.90	87.65	94.20	96.36	87.96	98.03	88.01	81.06	92.66	97.79	91.11	100.00	100.00
15	KAB KARAWANG	83.51	88.55	94.18	95.66	83.41	95.09	70.42	87.29	55.61	76.72	85.49	73.17	96.56
16	KAB BEKASI	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



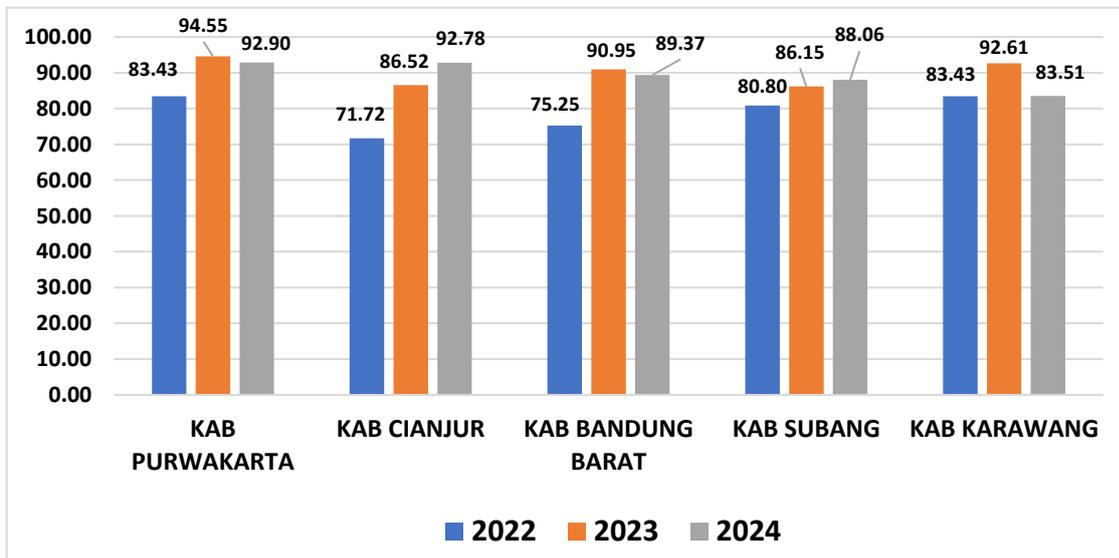
Akuntabilitas Kinerja

REKAPITULASI CAPAIAN SPM

		0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
NO.	KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN SPM TW4	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)
17	KAB BANDUNG BARAT	89.37	90.18	89.56	92.65	91.99	95.28	94.92	89.25	88.53	100.00	89.42	84.01	67.65
18	KAB PANGANDARAN	89.03	89.27	89.23	90.60	79.89	92.87	73.43	90.86	93.16	90.93	93.31	92.98	91.83
19	KOTA BOGOR	99.98	100.00	100.00	100.00	99.90	99.82	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
20	KOTA SUKABUMI	99.56	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.94	100.00	100.00	100.00	96.72	100.00	100.00
21	KOTA BANDUNG	98.34	97.91	94.10	95.65	99.86	94.93	100.00	98.28	99.73	100.00	100.00	99.92	99.76
22	KOTA BEKASI	90.94	96.20	96.27	98.56	93.92	89.65	55.91	92.65	79.20	96.69	93.86	99.48	99.96
23	KOTA DEPOK	98.11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.79	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	81.56
24	KOTA CIMAH	99.87	99.60	99.68	100.00	99.73	100.00	99.47	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
25	KOTA TASIKMALAYA	98.30	99.67	98.84	99.15	98.00	99.89	100.00	90.37	100.00	100.00	100.00	94.29	99.43
26	KOTA CIREBON	98.67	99.04	98.90	99.51	100.00	99.08	87.72	99.83	99.96	99.96	100.00	100.00	100.00
27	KOTA BANJAR	93.46	80.19	88.66	87.14	98.01	98.08	96.56	81.07	99.96	99.96	99.13	92.76	99.96
	TOTAL	94.79	82.29	79.23	84.26	84.42	90.38	89.91	78.70	75.90	71.17	70.34	73.16	80.05



Grafik 3.2
Perbandingan Capaian SPM dengan Kabupaten
Wilayah Perbatasan Tahun 2022- 2024



Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Tabel 3.6
Standar Kategori Penilaian IKM

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERNAL (NI)	NILAI INTERNAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN (Y)
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,6 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Rincian Perbandingan Nilai IKM dari tahun 2022, 2023, dan 2024 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :


Tabel : 3.7
Tren Nilai IKM Dari Dinkes, Puskesmas, Labkesda Dan UTD PMI Tahun 2022 s/d 2024

NO	PUSKESMAS	IKM Tahun 2022			IKM Tahun 2023			IKM Tahun 2024			Trend	
		Bobot	Konversi	Kriteria IKM	Bobot	Konversi	Kriteria IKM	Bobot	Konversi	Kriteria IKM	Nilai	Kategori
1	Jatiluhur	3,13	78,29	Baik	3,38	84,45	Baik	3,63	90,80	Sangat Baik	Naik	Naik
2	Sukasari	3,09	77,35	Baik	3,07	76,71	Baik	3,19	79,65	Baik	Naik	Tetap
3	Maniis	3,21	80,36	Baik	3,20	79,90	Baik	3,20	80,09	Baik	Naik	Tetap
4	Tegalwaru	3,28	81,95	Baik	3,29	82,33	Baik	3,37	84,13	Baik	Turun	Naik
5	Plered	3,13	78,29	Baik	3,21	80,16	Baik	3,37	84,34	Baik	Naik	Tetap
6	Sukatani	3,24	81,08	Baik	3,32	82,96	Baik	3,33	83,16	Baik	Naik	Tetap
7	Darangdan	3,17	79,3	Baik	3,23	80,87	Baik	3,13	78,29	Baik	Turun	Tetap
8	Bojong	3,19	79,71	Baik	3,15	78,74	Baik	3,21	80,27	Baik	Naik	Tetap
9	Wanayasa	3,14	78,52	Baik	3,16	79,04	Baik	3,18	79,41	Baik	Naik	Tetap
10	Kiarapedes	3,21	80,29	Baik	3,43	85,73	Baik	3,45	86,34	Baik	Naik	Tetap
11	Pasawahan	3,24	81,1	Baik	3,33	83,22	Baik	3,38	84,46	Baik	Naik	Tetap
12	Pondoksalam	3,32	83,08	Baik	3,11	77,66	Baik	3,37	84,33	Baik	Naik	Tetap
13	Purwakarta	3,53	88,16	Baik	3,23	80,78	Baik	3,48	87,09	Baik	Naik	Tetap
14	Munjuljaya	3,09	77,32	Baik	3,20	79,91	Baik	3,14	78,42	Baik	Turun	Tetap
15	Koncara	3,45	86,15	Baik	3,40	85,07	Baik	3,46	86,39	Baik	Naik	Tetap
16	Maracang	3,24	80,92	Baik	3,27	81,66	Baik	3,34	83,46	Baik	Naik	Tetap
17	Mulyamekar	3,17	79,22	Baik	3,44	85,96	Baik	3,40	85,06	Baik	Turun	Tetap
18	Campaka	2,9	72,61	Kurang Baik	3,08	77,01	Baik	3,23	80,69	Baik	Naik	Tetap
19	Cibatu	3,39	84,64	Baik	3,18	79,51	Baik	3,33	83,33	Baik	Naik	Tetap
20	Bungursari	3,17	79,24	Baik	3,17	79,31	Baik	3,51	87,68	Baik	Naik	Tetap
21	PTD Labkesda	3,32	82,99	Baik	3,29	82,30	Baik	3,40	84,95	Baik	Naik	Tetap
22	UTD PMI				3,36	83,99	Baik	3,67	91,72	Sangat Baik	Naik	Naik
23	Dinas Kesehatan							3,42	85,38	Baik		
	Rata2 Kab	3,24	81	Baik	3,27	81,86	Baik	3,36	83,93	Baik	Naik	Tetap



Trend nilai IKM untuk tingkat Kabupaten pada tahun 2024 di 23 (dua puluh tiga) Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta mengalami tren naik dengan nilai 3,27 (81, 86) dengan kategori baik pada tahun 2023 menjadi 3,36 (83,93) dengan kategori baik pada tahun 2024.

Tabel 3.8
Tren Kategori nilai IKM
Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2024

NO	PUSKESMAS	Bobot Rata-rata	Konversi Mutu	Kreteria Pelayanan
1	Jatiluhur	3,63	90,80	Sangat Baik
2	Sukasari	3,19	79,65	Baik
3	Maniis	3,20	80,09	Baik
4	Tegalwaru	3,37	84,13	Baik
5	Plered	3,37	84,34	Baik
6	Sukatani	3,33	83,16	Baik
7	Darangdan	3,13	78,29	Baik
8	Bojong	3,21	80,27	Baik
9	Wanayasa	3,18	79,41	Baik
10	Kiarapedes	3,45	86,34	Baik
11	Pasawahan	3,38	84,46	Baik
12	Pondoksalam	3,37	84,33	Baik
13	Purwakarta	3,48	87,09	Baik
14	Munjuljaya	3,14	78,42	Baik
15	Koncara	3,46	86,39	Baik
16	Maracang	3,34	83,46	Baik
17	Mulyamekar	3,40	85,06	Baik
18	Campaka	3,23	80,69	Baik
19	Cibatu	3,33	83,33	Baik
20	Bungursari	3,51	87,68	Baik
21	PTD Labkesda	3,40	84,95	Baik
22	UTD PMI	3,67	91,72	Sangat Baik
23	Dinas Kesehatan	3,42	85,38	Baik
	Rata2 Kab	3,36	83,93	Baik



Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan sebagaimana tabel dibawah ini.

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan sebagai berikut :

a. Penyebab keberhasilan

- ❖ Telah mencapai target disebabkan koordinasi antar lintas sektor terkait berjalan secara aktif
- ❖ Telah mencapai target disebabkan koordinasi antar lintas sektor terkait berjalan secara aktif
- ❖ Telah mencapai target disebabkan upaya perbaikan telah dilakukan sehingga dapat meningkatkan nilai kinerja
- ❖ Telah mencapai target disebabkan unit pelayanan Publik (Puskesmas, Labkes) telah menerapkan standar pelayanan publik yang memadai sesuai SOP

b. Penyebab kegagalan

- Belum mencapai target sebab pendataan sasaran belum efektif dimana belum terintegrasi data penerima layanan dengan data disdukcapil.

Sedangkan solusi yang dilakukan yaitu:

- ✓ Lebih meningkatkan koordinasi antar lintas sektor terkait sehingga bisa lebih aktif dan efektif
- ✓ Lebih meningkatkan koordinasi antar lintas sektor terkait sehingga bisa lebih aktif dan efektif
- ✓ Lebih meningkatkan koordinasi dengan disdukcapil terkait data sasaran, meningkatkan kunjungan rumah dan meningkatkan peran kader untuk pendataan data sasaran
- ✓ Lebih meningkatkan kerjasama dengan APIP dalam pembinaan dan pemenuhan dan peningkatan kinerja organisasi



- ✓ Lebih meningkatkan pelayanan publik pada Puskesmas dan Labkes sehingga pelanggan/masyarakat semakin puas terhadap layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tersebut



Tabel 3.9
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi
Dinas Kesehatan Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisa si	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	$(6)=\frac{(5)}{(4)} \times 100$	(7)	(8)
A	Tujuan :						
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur harapan hidup	71,51	71,51	100	Telah mencapai target disebabkan koordinasi antar lintas sektor terkait berjalan secara aktif	Lebih meningkatkan koordinasi antar lintas sektor terkait sehingga bisa lebih aktif dan efektif
B	Sasaran :						
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Umur Harapan Hidup	71,51	71,51	100	Telah mencapai target disebabkan koordinasi antar lintas sektor terkait berjalan secara aktif	Lebih meningkatkan koordinasi antar lintas sektor terkait sehingga bisa lebih aktif dan efektif
		Cakupan Indeks Pencapaian (IP) SPM Kesehatan	100	92,90	92,90	Belum mencapai target sebab pendataan sasaran belum efektif dimana belum terintegrasi data penerima layanan dengan data disdukcapil	Lebih meningkatkan koordinasi dengan disdukcapil terkait data sasaran, meningkatkan kunjungan rumah dan meningkatkan peran kader untuk pendataan data sasaran
C	Tujuan						
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A*	100	Telah mencapai target disebabkan upaya perbaikan telah dilakukan sehingga dapat meningkatkan nilai kinerja	Lebih meningkatkan kerjasama dengan APIP dalam pembinaan dan pemenuhan dan peningkatan kinerja organisasi
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	83,93	100	Telah mencapai target disebabkan unit pelayanan Publik (Puskesmas, Labkes) telah menerapkan standar pelayanan publik yang memadai sesuai SOP	Lebih meningkatkan pelayanan publik pada Puskesmas dan Labkes sehingga pelanggan/masyarakat semakin puas terhadap layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tersebut



Akuntabilitas Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisa si	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	$(6)=\frac{(5)}{(4)} \times 100$	(7)	(8)
D	Sasaran						
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A*	100	Telah mencapai target disebabkan upaya perbaikan telah dilakukan sehingga dapat meningkatkan nilai kinerja	Lebih meningkatkan kerjasama dengan APIP dalam pembinaan dan pemenuhan dan peningkatan kinerja organisasi
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	83,93	100	Telah mencapai target disebabkan unit pelayanan Publik (Puskesmas, Labkes) telah menerapkan standar pelayanan publik yang memadai sesuai SOP	Lebih meningkatkan pelayanan publik pada Puskesmas dan Labkes sehingga pelanggan/masyarakat semakin puas terhadap layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tersebut



Mengukur tingkat efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Laporan Kinerja dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/Pmk.02/2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu Anggaran
Keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran
Keluaran i

CAKi : Capaian Keluaran i



Analisis efisiensi terhadap sumber daya sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.10
Analisis Efisiensi terhadap Sumber Daya
Di Dinas Kesehatan Berdasarkan Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			
			TARGE T	REALI SASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	TUJUAN								
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,34	71,51	100	247.973.228.842	226.875.585.502	91,49	99,09
1.1	SASARAN								
	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	71,34	71,51	100	123.986.614.421	113.437.792.751	91,49	99,09
		Cakupan Pelayanan SPM Kesehatan	85,00	92,71	92,71	123.986.614.421	113.437.792.751	91,49	99,01



Akuntabilitas Kinerja

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			
			TARGE T	REALI SASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	TUJUAN								
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	80	80	100	60.027.226.225	54.574.703.666	90,92	99,09
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	100	60.027.226.225	54.574.703.666	90,92	99,09
2.1	SASARAN								
	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	80	80	100	60.027.226.225	54.574.703.666	90,92	99,09
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	100	60.027.226.225	54.574.703.666	90,92	99,09



Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan tingkat efisiensi tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan mencapai 99%, sehingga anggaran tersebut efektif meningkatkan capaian kinerja Dinas Kesehatan tahun 2024.

Selanjutnya analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagaimana tabel dibawah ini. Berdasarkan analisis pada tabel tersebut menunjukkan terdapat 2 indikator yang tidak menunjang kepada pencapaian pernyataan kinerja karena nilainya nol. Hal ini disebabkan tidak adanya kebijakan dari Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan tersebut. Disamping itu tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan survey kepada masyarakat berisiko terkena penyakit tersebut termasuk sensitifas di masyarakat.



Tabel 3.11
Analisis Keberhasilan, Kegagalan Program Dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	TUJUAN						
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	100				
1.1	SASARAN						
	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	100	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
		Cakupan Pelayanan SPM Kesehatan	92,71		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	200	Menunjang
					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	87,75	Menunjang
			100		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	93,33	Menunjang
			100		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97,55	Menunjang



Akuntabilitas Kinerja

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	88,89	Menunjang
			100		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Menunjang
			100		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	89,44	Menunjang
			100		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	85,08	Menunjang
					Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	116,13	Menunjang
			100		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,33	Menunjang



Akuntabilitas Kinerja

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			92,71		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	107,45	Menunjang
					Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	105,26	Menunjang
			100		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	125	Menunjang
			100		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	87,75	Menunjang
					Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	93,33	Menunjang
			100		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	97,55	Menunjang



Akuntabilitas Kinerja

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			100		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	88,89	Menunjang
			100		Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	Menunjang
					Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	89,44	Menunjang
			100		Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	Menunjang
			92,71		Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	92,9	Menunjang
					Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	99,33	Menunjang



Akuntabilitas Kinerja

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	107,05	Menunjang
					Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100,79	Menunjang
					Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	125	Menunjang
					Rasio posyandu per satuan balita	268,57	Menunjang
					Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	Menunjang
					Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki	94,38	Menunjang



Akuntabilitas Kinerja

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					kompetensi kebidanan		
					Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	78,6	Menunjang
					Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	Menunjang
					Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	92,5	Menunjang
					Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	100	Menunjang
					Cakupan balita pneumonia yang ditangani	128.6	Menunjang
					Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	95,56	Menunjang
					Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	174,72	Menunjang



Akuntabilitas Kinerja

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	27,65	Menunjang
					Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	96,67	Menunjang
					Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	88,89	Menunjang
					Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	Menunjang
					Penderita diare yang ditangani	117,65	Menunjang
					Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	0	Tidak Menunjang
					Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	0	Tidak Menunjang



Akuntabilitas Kinerja

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Cakupan kunjungan bayi	97,56	Menunjang
					Cakupan puskesmas	117,65	Menunjang
					Cakupan pelayanan nifas	69,1	Menunjang
					Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	79,96	Menunjang
					Cakupan pelayanan anak balita	88,89	Menunjang
					Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	Menunjang
				Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			Menunjang
					Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan	250	Menunjang
					Persentase Ijin Praktik Tenaga Kesehatan yang diterbitkan	304,17	Menunjang



Akuntabilitas Kinerja

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	243,83	Menunjang
					Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan	277,1	Menunjang
					Rasio dokter per satuan penduduk	150	Menunjang
					Rasio tenaga medis per satuan penduduk	116,33	Menunjang
				Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman			
					Persentase Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan	100	Menunjang
					Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina	100	Menunjang
				Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
					Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang kesehatan	112,17	Menunjang



Akuntabilitas Kinerja

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase pembinaan kader/lembaga kesehatan masyarakat yang dibina	112,36	Menunjang
2	TUJUAN						
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	100	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
		Indeks Kepuasan Masyarakat	100		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	100	Menunjang
2.1	SASARAN						
	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	100				
		Indeks Kepuasan Masyarakat	100				



Selanjutnya penilaian dan evaluasi kinerja secara berjenjang sebagai berikut:

Tabel 3.12
Pengukuran Pencapaian Sasaran Program Dinas Kesehatan
Tahun 2024

No	Sasaran strategis Program Lingkup Sekretariat/ Bidang	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian	Realisasi	Persentase Tingkat Capaian	Ket
I	Sekretaris						
1.	Meningkatnya pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Cakupan Puskesmas	%	100	117.65	117.65	
2	Meningkatnya pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	%	A	BB	88.89	
II	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat						
1.	Meningkatnya pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100	87.75	87.75	
		2 Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	93.33	93.33	
		3 Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	%	100	97.55	97.55	
		4 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	100	88.89	88.89	



Akuntabilitas Kinerja

No	Sasaran strategis Program Lingkup Sekretariat/ Bidang	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian	Realisasi	Persentase Tingkat Capaian	Ket
		5 Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan standar	%	100	100	100	
		6 Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	85	85	
		7 Rasio posyandu per satuan balita	poin	17	46.57	268.57	
		8 Cakupan kompilkasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	
		9 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	94.38	94.38	
		10 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	97.56	97.56	
		11 Cakupan kunjungan bayi	%	100	117.65	117.65	
		12 Cakupan Puskesmas	%	100	69.1	69.1	
		13 Cakupan pelayanan nifas	%	100	79.96	79.96	
		14 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	97.56	97.56	
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1 Persentase tingkat pembinaan/ sosialisasi masyarakat dibidang Kesehatan	%	6	6.73	112.17	
		2 Persentase pembinaan kader/Lembaga Kesehatan masyarakat yang dibina	%	89	100	112.36	
III	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit						
1.	Meningkatnya pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Persentase Orang Usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	100	89	89.44	



Akuntabilitas Kinerja

No	Sasaran strategis Program Lingkup Sekretariat/ Bidang	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian	Realisasi	Persentase Tingkat Capaian	Ket
		2	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	80	92.9	116.13
		3	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100	99.33	99.33
		4	Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	107.45	107.45
		5	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	95	100	105.26
		6	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	80	100	125
		7	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	78.6	78.6
		8	Persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak	%	100	92.5	92.5
		9	Non polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	100	100	100
		10	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	70	90	128.6
		11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	90	86	95.56
		12	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	246	429.19	174.72
		13	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (Per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	2.58	9.33	27.65



Akuntabilitas Kinerja

No	Sasaran strategis Program Lingkup Sekretariat/ Bidang	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian	Realisasi	Persentase Tingkat Capaian	Ket
		14 Proposi jumlah kasus Tuberkolosis yang terditeksi dalam program DOTS	%	90	87	96.67	
		15 Proposi kasus Tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	90	80	88.89	
		16 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	
		17 Cakupan penderita diare yang ditangani	%	85	100	117.65	
		18 Cakupan penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir	%	100	0	0	
		19 Proposi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	80	0	0	
		20 Cakupan Puskesmas	%	100	117.65	117.65	
IV	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan						
1.	Meningkatnya pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	%	50	100	200	
		2 Cakupan Puskesmas	%	100	117.65	117.65	
		3 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana Kesehatan (RS)	%	100	100	100	
V	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan						
1.	Meningkatnya pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan	1 Cakupan Puskesmas	%	100	117.65	117.65	



Akuntabilitas Kinerja

No	Sasaran strategis Program Lingkup Sekretariat/ Bidang	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian	Realisasi	Persentase Tingkat Capaian	Ket
	Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
2	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Pemenuhan minimal 9 jenis tenaga Kesehatan	%	85	75	250	
		2 Persentase ijin praktik tenaga Kesehatan yang diterbitkan	%	80	91.25	304.17	
		3 Persentase kebutuhan tenaga sesuai standar	%	75	73.15	243.83	
		4 Persentase distribusi tenaga Kesehatan sesuai standar kebutuhan	%	78	83.13	277.1	
		5 Rasio dokter per satuan penduduk	Poin	30	45	150	
		6 Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Poin	30	34.9	116.33	
3	Meningkatnya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1 Persentase ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan	%	100	100	100	
		2 Cakupan sarana farmasi yang dibina	%	80	80	100	

Sasaran program merupakan indikator kinerja kegiatan (IKK) Dinas Kesehatan yang berada pada bidang dan sekretariat. Dimana terdapat 46 (empat puluh enam) indikator, dimana 35 indikator Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, 6 indikator Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2 indikator Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, 2 indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang



Kesehatan, dan 1 indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan indikator bidang dan sekretariat, maka pada sekretaris terdapat 2 indikator, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat terdapat 16 Indikator, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 20 indikator, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan terdapat 3 indikator, dan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan terdapat 9 indikator.

Berdasarkan capaian indikator Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat menunjukkan 11 indikator diatas target, 6 indikator mencapai target, 8 indikator diatas 90%, 6 indikator antara 80-90%, 2 indikator antara 70-80% dan 2 indikator tidak ada datanya karena tidak ada anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut yang perlu dilakukan melalui survey. Indikator Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan menunjukkan hanya 2 indikator yang tidak mencapai dengan capaian 88,24% dan 97,53%. Indikator Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan menunjukkan kedua indikator telah mencapai 100% dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan menunjukkan juga semuanya telah mencapai target 100%. Sedangkan 1 indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota masih menunggu hasil review SAKIP Dinas Kesehatan.

Berdasarkan capaian kemajuan sasaran strategis program terhadap target akhir RPD tahun 2026 terlihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 3.13
KEMAJUAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2024

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET AKHIR RPD (2026)	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)/(5)*100
1	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
1.1		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	65	153,85
1.2		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	87,84	100	87,84
1.3		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	93,38	100	93,38
1.4		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97,87	100	97,87
1.5		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	88,58	100	88,58
1.6		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100,00
1.7		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	89	100	89,44
1.8		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	85,08	100	85,08
1.9		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92,9	100	92,90
1.10		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,33	100	99,33
1.11		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan	107,45	100	107,45



Akuntabilitas Kinerja

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET AKHIR RPD (2026)	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)/(5)*100
		pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			
1.12		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100,00
1.13		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100	100,00
1.14		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	87,75	100	87,75
1.15		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	93,33	100	93,33
1.16		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	97,55	100	97,55
1.17		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	88,89	100	88,89
1.18		Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100,00
1.19		Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	89,44	100,00	89,44
1.20		Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	92,57	100	92,57
1.21		Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	92,9	100	92,90
1.22		Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	99,33	100	99,33
1.23		Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	107,05	100	107,05


Akuntabilitas Kinerja

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET AKHIR RPD (2026)	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)/(5)*100
1.24		Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	95,75	100	95,75
1.25		Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100,00
1.26		Rasio posyandu per satuan balita	46,57	100	46,57
1.27		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100	100	100,00
1.28		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	94,38	100	94,38
1.29		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	78,6	100	78,60
1.30		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100,00
1.31		Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	92,5	100	92,50
1.32		Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	100	100	100,00
1.33		Cakupan balita pneumonia yang ditangani	90	90	100
1.34		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	86	100	86,00
1.35		Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	429,19	171,49	250,27
1.36		Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	9,33	1,94	480,93
1.37		Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang	87	100	87,00



Akuntabilitas Kinerja

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET AKHIR RPD (2026)	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)/(5)*100
		terdeteksi dalam program DOTS			
1.38		Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	80	95	84,21
1.39		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100,00
1.40		Penderita diare yang ditangani	100	100	100,00
1.41		Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	0	100	0,00
1.42		Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	0	100	0,00
1.43		Cakupan kunjungan bayi	97,56	100	97,56
1.44		Cakupan puskesmas	117,65	100	117,65
1.45		Cakupan pelayanan nifas	69,1	100	69,10
1.46		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	79,96	100	79,96
1.47		Cakupan pelayanan anak balita	88,89	100	88,89
1.48		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100	100,00
2	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				
2.1		Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan	75	40	187,50
2.2		Persentase Ijin Praktik Tenaga Kesehatan yang diterbitkan	91,25	40	228,13
2.3		Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	73,15	40	182,88
2.4		Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan	83,13	40	207,83
2.5		Rasio dokter per satuan penduduk	45	40	112,50



Akuntabilitas Kinerja

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET AKHIR RPD (2026)	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)/(5)*100
2.6		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	34,9	40	87,25
3	Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman				
3.1		Persentase Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan	100	100	100,00
3.2		Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina	80	85	94,12
4	Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
4.1		Tingkat pembinaan/ sosialisasi masyarakat dibidang kesehatan	6,73	10	67,30
4.2		Persentase pembinaan kader/ lembaga kesehatan masyarakat yang dibina	100	100	100,00
5	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
5.1		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	A	88,89

Berdasarkan data perbandingan kinerja perbandingan capaian tahun 2023 dan 2024 pada sasaran program sebagaimana tabel dibawah ini.



Tabel 3.14

CAPAIAN PERBANDINGAN KINERJA TAHUN 2023 DAN 2024

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2023			2024	PENGAMPU
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
1.1		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	100	100	200	Yankes
1.2		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	98,4	98,4	87,84	Kesmas
1.3		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	97,9	97,9	93,38	Kesmas
1.4		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	99,1	99,1	97,87	Kesmas
1.5		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	91,2	91,2	88,58	Kesmas
1.6		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	92,64	92,64	100	Kesmas
1.7		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	81,16	81,16	89,44	P2P
1.8		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	76	85,08	Kesmas
1.9		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	96,14	96,14	116,13	P2P



Akuntabilitas Kinerja

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2023			2024	PENGAMPU
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.10		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	102,33	102,33	99,33	P2P
1.11		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00	103,18	103,18	107,45	P2P
1.12		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	90,5	90,5	105,26	P2P
1.13		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	91	91	125	P2P
1.14		Persentase Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	87,31	87,31	87,75	Kesmas
1.15		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	97,94	97,94	93,38	Kesmas
1.16		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	105,63	105,63	97,87	Kesmas
1.17		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	76,84	76,84	88,58	Kesmas
1.18		Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	92,64	92,64	100	Kesmas
1.19		Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100,00	81,1600	81,16	89,44	P2P
1.20		Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	76	92,57	Kesmas


Akuntabilitas Kinerja

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2023			2024	PENGAMPU
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.21		Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100,00	96,14	96,14	92,9	P2P
1.22		Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	102,33	102,33	99,33	P2P
1.23		Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	103,18	103,18	107,05	P2P
1.24		Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	90,55	90,5	100,79	P2P
1.25		Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	91	91	125	P2P
1.26		Rasio posyandu per satuan balita	75895	75895	72,28	67,08	Promkes
1.27		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100,00	106,07	106,07	101,49	Kesmas
1.28		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100,00	97,94	97,94	93,38	Kesmas
1.29		Cakupan Desa/kecamatan Universal Child Immunization (UCI)	100,00	95,00	95,00	78,6	P2P
1.30		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	87,00	100,00	114,94	100	Kesmas
1.31		Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	100,00	99,5	99,50	92,5	P2P
1.32		Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	>3/100.000	13,56	13,56	100	P2P
1.33		Cakupan balita pneumonia yang ditangani	90,00	98,81	109,79	128,6	P2P



Akuntabilitas Kinerja

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2023			2024	PENGAMPU
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.34		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	90,00	102	113,33	95,56	P2P
1.35		Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	245	497,2	202,94	174,72	P2P
1.36		Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	2	0,77	49,56	27,65	P2P
1.37		Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	90,00	102	113,33	96,67	P2P
1.38		Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	90	81,50	90,56	88,89	P2P
1.39		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	P2P
1.40		Penderita diare yang ditangani	100,00	100.00	100.00	117,65	P2P
1.41		Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	0	0	0	0	P2P
1.42		Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	0	0	0	0	P2P
1.43		Cakupan kunjungan bayi	100	94,08	94,08	101	Kemas
1.44		Cakupan puskesmas	100	117	117	117,65	SDK
1.45		Cakupan pelayanan nifas	100	99,4	99,4	94,16	Kemas
1.46		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100	81,94	81,94	80,46	Kemas
1.47		Cakupan pelayanan anak balita	100	72,43	72,43	85,18	Kemas
1.48		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100	100	100	Yankes
2	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan						
2.1		Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan	100	75	75	250	SDK



Akuntabilitas Kinerja

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2023			2024	PENGAMPU
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	% CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.2		Persentase Ijin Praktik Tenaga Kesehatan yang diterbitkan	75	81,86	81,86	304,17	SDK
2.3		Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	100	412	412	243,83	SDK
2.4		Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan	75	81,86	81,86	277,1	SDK
2.5		Rasio dokter per satuan penduduk	30	45	150	150	SDK
2.6		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	30	34,9	116,33	116,33	SDK
3	Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman						
3.1		Persentase Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan	100	100	100	100	SDK
3.2		Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina	80	71,72	89,65	100	SDK
4	Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						
4.1		Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang kesehatan	5	5	100	100	Kesmas
4.2		Persentase pembinaan kader/lembaga kesehatan masyarakat yang dibina	17	17	100	112,36	Kesmas
5	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
5.1		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	A	112,5	88,89	Sekretariat



Berdasarkan capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2024 menunjukkan secara umum mengalami peningkatan, meskipun ada beberapa yang lebih rendah dibandingkan tahun 2023, tetapi secara capaian masih diatas 80%.

Adapun data capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan standar nasional, provinsi maupun kabupaten sekitar terlihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 3.15
Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten Kota Lain

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	STANDAR NASIONAL	STANDAR PROVINSI	KABUPATEN/KOTA				PENGAMPU
						CIANJUR	SUBANG	KARAWANG	KBB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat									
1.1		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100,00	100	100	100	100	100	100	Yankes
1.2		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	87,84	100	100	88,69	88,01	81,06	89,11	Kesmas
1.3		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	93,38	100	100	88,14	88,47	82,01	87,96	Kesmas
1.4		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97,87	100	100	92,8	101,05	86,48	91,57	Kesmas
1.5		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	88,58	100	100	86,61	106,39	100,42	92	Kesmas
1.6		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00		98,31	94,55	100	92,13	77,57	Kesmas
1.7		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	89,44	100,000	100,00	20,88	40,03	10,61	23,65	P2P
1.8		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	85,08	100	100	93,34	72,31	90,61	82,61	Kesmas
1.9		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92,90	100,00	100,00	40,37	80,56	59,46	31,59	P2P
1.10		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,33	100,00	100,00	49,15	88,90	86,26	35,53	P2P
1.11		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	107,45	100,00	100,00	36,86	41,75	76,73	25,21	P2P
1.12		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100	95	94	123	50	P2P
1.13		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00	100	100	72,39	113	113,5	66,36	P2P
1.14		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	87,84	100	100	88,69	88,01	81,06	89,11	Kesmas
1.15		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	93,38	100	100	88,14	88,47	82,01	87,96	Kesmas



Akuntabilitas Kinerja

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	STANDAR NASIONAL	STANDAR PROVINSI	KABUPATEN/KOTA				PENGAMPU
						CIANJUR	SUBANG	KARAWANG	KBB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.16		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	97,87	100	100	92,8	101,05	86,48	91,57	Kesmas
1.17		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	88,58	100	100	86,61	106,39	100,42	92	Kesmas
1.18		Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100,00		7705280	379227	257500	417751	271176	Kesmas
1.19		Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	89,44	100,000	100,00	20,88	40,03	10,61	23,65	P2P
1.20		Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100,00	92,57	100	93,34	58,54	90,61	88,35	Kesmas
1.21		Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	92,90	100,00	100,00	40,37	80,56	59,46	31,59	P2P
1.22		Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	99,33	100,00	100,00	49,15	88,90	86,26	35,53	P2P
1.23		Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	107,45	100,00	100,00	36,86	41,75	76,73	25,21	P2P
1.24		Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	90,5	90,5	95	94	123	50	P2P
1.25		Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100,00	100	100	72,39	113	113,5	66,36	P2P
1.26		Rasio posyandu per satuan balita	46,57							Kesmas
1.27		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100,00							Kesmas
1.28		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	94,38							Kesmas
1.29		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	78,6	100	100					P2P
1.30		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00		90,72	100	89,29	100	98,80	Kesmas
1.31		Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	95,2							P2P
1.32		Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	13,23							P2P
1.33		Cakupan balita pneumonia yang ditangani	90	75	75	83,2	64	41,23	37,2	P2P
1.34		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	86	95	95,0	80	92	87	90	P2P


Akuntabilitas Kinerja

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	STANDAR NASIONAL	STANDAR PROVINSI	KABUPATEN/KOTA				PENGAMPU
						CIANJUR	SUBANG	KARAWANG	KBB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.35		Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	486	497,2	497,2					P2P
1.36		Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	2	8,2	8					P2P
1.37		Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	90	4800	102					P2P
1.38		Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	90	3.913	81,5					P2P
1.39		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	100	P2P
1.40		Penderita diare yang ditangani	100	85	85	100	100	100	100	P2P
1.41		Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	0,00	0	0	0	0	0	0	P2P
1.42		Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	0,00	0	0	0	0	0	0	P2P
1.43		Cakupan kunjungan bayi	97,56							Kesmas
1.44		Cakupan puskesmas	117,65							SDK
1.45		Cakupan pelayanan nifas	69,1	100	100					Kesmas
1.46		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	79,96	100	100					Kesmas
1.47		Cakupan pelayanan anak balita	88,89	100	100					Kesmas
1.48		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100,00	100	100					Yankes
2	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan									
2.1		Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan	75							SDK
2.2		Persentase Ijin Praktik Tenaga Kesehatan yang diterbitkan	91,25							SDK
2.3		Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	73,15							SDK
2.4		Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan	83,13							SDK
2.5		Rasio dokter per satuan penduduk	45							SDK
2.6		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	34,9							SDK



Akuntabilitas Kinerja

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	STANDAR NASIONAL	STANDAR PROVINSI	KABUPATEN/KOTA				PENGAMPU
						CIANJUR	SUBANG	KARAWANG	KBB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman									
3.1		Persentase Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan	100.00							SDK
3.2		Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina	80.00	100	100				90	SDK
4	Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan									
4.1		Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang kesehatan	6,73							Kesmas
4.2		Persentase pembinaan kader/lembaga kesehatan masyarakat yang dibina	100.00							Kesmas
5	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
5.1		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Proses penilaian			Proses penilaian	Proses penilaian	Proses penilaian	Proses penilaian	Sekretariat



**Tabel 3.16
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi
Tahun 2024**

No	Sasaran strategis Program Lingkup Sekretariat/ Bidang	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
I	Sekretaris							
1.	Meningkatnya pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Cakupan Puskesmas	%	100	117.65	117.65	Melampaui target dimana secara kuantitas Puskesmas telah melebihi jumlah kecamatan tapi terdapat 4 Puskesmas yang melebihi standar rasio puskesmas terhadap penduduk	Perencanaan pembangunan dan pengembangan Puskesmas termasuk relokasi dan pemenuhan SDM beserta sarana prasana dan alat kesehatan
2	Meningkatnya pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	%	A	BB	88.89	Telah mencapai target disebabkan upaya perbaikan telah dilakukan sehingga dapat meningkatkan nilai kinerja	Lebih meningkatkan kerjasama dengan APIP dalam pembinaan dan pemenuhan dan peningkatan kinerja organisasi
II	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat							



Akuntabilitas Kinerja

No	Sasaran strategis Program Lingkup Sekretariat/ Bidang	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.	Meningkatnya pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100	87.75	87.75	Belum mencapai target kemungkinan karena banyaknya program di tingkat puskesmas yang tidak sebanding dengan jumlah nakes, belum efektifnya pendataan, sweeping dan kunjungan rumah	Perlu lebih intens kunjungan rumah, sweping dan kerjasama dengan RS, klinik, maupun fasyankes serta kader untuk memastikan tidak ada ibu hamil yang tidak terlayani
		2 Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	93.33	93.33	Belum mencapai target kemungkinan karena banyaknya program di tingkat puskesmas yang tidak sebanding dengan jumlah nakes, belum efektifnya pendataan, sweeping dan kunjungan rumah	Perlu lebih intens kunjungan rumah, sweping dan kerjasama dengan RS, klinik, maupun fasyankes serta kader untuk memastikan tidak ada ibu bersalin yang tidak terlayani
		3 Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan	%	100	97.55	97.55	Belum mencapai target kemungkinan	Perlu lebih intens kunjungan rumah, sweping dan



Akuntabilitas Kinerja

No	Sasaran strategis Program Lingkup Sekretariat/ Bidang	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
		pelayanan Kesehatan bayi baru lahir					karena banyaknya program di tingkat puskesmas yang tidak sebanding dengan jumlah nakes, belum efektifnya pendataan, sweeping dan kunjungan rumah	kerjasama dengan RS, klinik, maupun fasyankes serta kader untuk memastikan tidak ada bayi baru lahir yang tidak terlayani
		4 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	100	88.89	88.89	Belum mencapai target kemungkinan karena banyaknya program di tingkat puskesmas yang tidak sebanding dengan jumlah nakes, belum efektifnya pendataan, sweeping dan kunjungan rumah	Perlu lebih intens kunjungan rumah, sweping dan kerjasama dengan RS, klinik, maupun fasyankes serta kader untuk memastikan tidak ada balita yang tidak terlayani sesuai standar
		5 Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan standar	%	100	100	100	Telah mencapai target sehingga perlu dipertahankan	Bisa diperluas sasaran dan jenis program layanan kesehatan



Akuntabilitas Kinerja

No	Sasaran strategis Program Lingkup Sekretariat/ Bidang	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
		6 Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	85	85	Belum mencapai target kemungkinan karena banyaknya program di tingkat puskesmas yang tidak sebanding dengan jumlah nakes, belum efektifnya pendataan, sweeping dan kunjungan rumah	Perlu lebih intens kunjungan rumah, sweeping dan kerjasama dengan RS, klinik, maupun fasyankes serta kader untuk memastikan tidak ada lansia yang tidak terlayani sesuai standar
		7 Rasio posyandu per satuan balita	poin	17	46.57	268.57	Telah melampaui target sehingga bisa diarahkan kepada peningkatan posyandu termasuk kualitas dan kuantitas kader posyandu	Perlu adanya reward/ insentif untuk kader posyandu termasuk pelatihan dan refreshing kader serta peningkatan sarana prasarana posyandu
		8 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	Telah mencapai target	Tetap harus dipantau agar bayi atau ibu hamil resti dapat tetap sehat dan selamat saat melahirkan dan bayi tetap sehat dan



Akuntabilitas Kinerja

No	Sasaran strategis Program Lingkup Sekretariat/ Bidang	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
								tumbuh kembang secara baik
		9 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	94.38	94.38	Belum mencapai target	Perlu upaya lebih keras untuk peningkatan capaian kinerja tahun yang akan datang
		10 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	97.56	97.56	Belum mencapai target	Perlu upaya lebih keras untuk peningkatan capaian kinerja tahun yang akan datang
		11 Cakupan kunjungan bayi	%	100	117.65	117.65	Telah melampaui target	Perlu upaya mempertahankan capaian kinerja
		12 Cakupan Puskesmas	%	100	69.1	69.1	Melampaui target dimana secara kuantitas Puskesmas telah melebihi jumlah kecamatan tapi terdapat 4 Puskesmas yang melebihi standar rasio puskesmas terhadap penduduk	Perencanaan pembangunan dan pengembangan Puskesmas termasuk relokasi dan pemenuhan SDM beserta sarana prasana dan alat kesehatan



Akuntabilitas Kinerja

No	Sasaran strategis Program Lingkup Sekretariat/ Bidang	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
		13 Cakupan pelayanan nifas	%	100	79.96	79.96	Belum mencapai target	Perlu upaya lebih keras untuk peningkatan capaian kinerja tahun yang akan datang
		14 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	97.56	97.56	Belum mencapai target	Perlu upaya lebih keras untuk peningkatan capaian kinerja tahun yang akan datang
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1 Persentase tingkat pembinaan/ sosialisasi masyarakat dibidang Kesehatan	%	6	6.73	112.17	Telah melampaui target	Perlu upaya mempertahankan capaian kinerja
		2 Persentase pembinaan kader/ Lembaga Kesehatan masyarakat yang dibina	%	89	100	112.36	Telah melampaui target	Perlu upaya mempertahankan capaian kinerja
III	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit							
1.	Meningkatnya pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan	1 Persentase Orang Usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	100	89	89.44	Belum mencapai target	Perlu upaya lebih keras untuk peningkatan capaian kinerja


Akuntabilitas Kinerja

No	Sasaran strategis Program Lingkup Sekretariat/ Bidang	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
	Dan Upaya Kesehatan Masyarakat							tahun yang akan datang
		2 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	80	92.9	116.13	Telah melampaui target	Perlu upaya mempertahankan capaian kinerja
		3 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100	99.33	99.33	Belum mencapai target	Perlu upaya lebih keras untuk peningkatan capaian kinerja tahun yang akan datang
		4 Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	107.45	107.45	Telah melampaui target	Perlu upaya mempertahankan capaian kinerja
		5 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	95	100	105.26	Telah melampaui target	Perlu upaya mempertahankan capaian kinerja
		6 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	80	100	125	Telah melampaui target	Perlu upaya mempertahankan capaian kinerja



Akuntabilitas Kinerja

No	Sasaran strategis Program Lingkup Sekretariat/ Bidang	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
		mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar						
		7 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	78.6	78.6	Belum mencapai target	Perlu upaya lebih keras untuk peningkatan capaian kinerja tahun yang akan datang
		8 Persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak	%	100	92.5	92.5	Belum mencapai target	Perlu upaya lebih keras untuk peningkatan capaian kinerja tahun yang akan datang
		9 Non polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	100	100	100	Telah mencapai target	Perlu upaya mempertahankan capaian kinerja
		10 Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	70	90	128.6	Telah melampaui target	Perlu upaya mempertahankan capaian kinerja
		11 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	90	86	95.56	Belum mencapai target	Perlu upaya lebih keras untuk peningkatan capaian kinerja tahun yang akan datang


Akuntabilitas Kinerja

No	Sasaran strategis Program Lingkup Sekretariat/ Bidang	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
		12 Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	246	429.19	174.72	Telah melampaui target	Perlu upaya lebih keras untuk peningkatan capaian kinerja tahun yang akan datang
		13 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (Per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	2.58	9.33	27.65	Belum mencapai target	Perlu upaya mempertahankan capaian kinerja
		14 Proposi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	90	87	96.67	Belum mencapai target	
		15 Proposi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	90	80	88.89	Belum mencapai target	
		16 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	Telah mencapai target	Perlu upaya mempertahankan capaian kinerja
		17 Cakupan penderita diare yang ditangani	%	85	100	117.65	Telah melampaui target	Perlu upaya mempertahankan capaian kinerja
		18 Cakupan penggunaan kondom pada	%	100	0	0	Tidak ada data karena tidak ada	Melakukan usulan revisi indikator



Akuntabilitas Kinerja

No	Sasaran strategis Program Lingkup Sekretariat/ Bidang	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
		hubungan seks beresiko tinggi terakhir					survey/ penelitian untuk kegiatan tersebut	tersebut dan bila tetap diperlukan maka perlu anggaran yang memadai termasuk kerjasama dengan LSM/yayasan/ perguruan tinggi yang bergerak dalam bidang tersebut
		19 Proposi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	80	0	0	Tidak ada data karena tidak ada survey/ penelitian untuk kegiatan tersebut	Melakukan usulan revisi indikator tersebut dan bila tetap diperlukan maka perlu anggaran yang memadai termasuk kerjasama dengan LSM/yayasan/ perguruan tinggi yang bergerak dalam bidang tersebut
		20 Cakupan Puskesmas	%	100	117.65	117.65	Melampaui target dimana secara kuantitas Puskesmas telah melebihi jumlah	Perencanaan pembangunan dan pengembangan Puskesmas termasuk relokasi


Akuntabilitas Kinerja

No	Sasaran strategis Program Lingkup Sekretariat/ Bidang	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
							kecamatan tapi terdapat 4 Puskesmas yang melebihi standar rasio puskesmas terhadap penduduk	dan pemenuhan SDM beserta sarana prasana dan alat kesehatan
IV	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan							
1.	Meningkatnya pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	%	50	100	200	Melampaui target karena RS hanya 11 buah	pemantauan dan pembinaan pasca akreditasi tetap perlu dilakukan untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan
		2 Cakupan Puskesmas	%	100	117.65	117.65	Melampaui target dimana secara kuantitas Puskesmas telah melebihi jumlah kecamatan tapi terdapat 4 Puskesmas yang melebihi standar rasio puskesmas terhadap penduduk	Perencanaan pembangunan dan pengembangan Puskesmas termasuk relokasi dan pemenuhan SDM beserta sarana prasana dan alat kesehatan


Akuntabilitas Kinerja

No	Sasaran strategis Program Lingkup Sekretariat/ Bidang	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
		3 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana Kesehatan (RS)	%	100	100	100	Telah mencapai target	Perlu upaya mempertahankan capaian kinerja
V	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan							
1.	Meningkatnya pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Cakupan Puskesmas	%	100	117.65	117.65	Melampaui target dimana secara kuantitas Puskesmas telah melebihi jumlah kecamatan tapi terdapat 4 Puskesmas yang melebihi standar rasio puskesmas terhadap penduduk	Perencanaan pembangunan dan pengembangan Puskesmas termasuk relokasi dan pemenuhan SDM beserta sarana prasana dan alat kesehatan
2	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Pemenuhan minimal 9 jenis tenaga Kesehatan	%	85	75	88,24	Belum mencapai target karena adanya pensiun, mutasi, dan mengundurkan diri	Mengajukan formasi penambahan ke BKSDM maupun Kemenkes
		2 Persentase ijin praktik tenaga Kesehatan yang diterbitkan	%	80	91.25	114,06	Telah melampaui target	Perlu upaya mempertahankan capaian kinerja
		3 Persentase kebutuhan tenaga sesuai standar	%	75	73.15	97,53	Belum mencapai target	



Akuntabilitas Kinerja

No	Sasaran strategis Program Lingkup Sekretariat/ Bidang	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
		4 Persentase distribusi tenaga Kesehatan sesuai standar kebutuhan	%	78	83.13	106,58	Telah melampaui target	Perlu upaya mempertahankan capaian kinerja
		5 Rasio dokter per satuan penduduk	Poin	30	45	150	Telah melampaui target	Perlu upaya mempertahankan capaian kinerja
		6 Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Poin	30	34.9	116.33	Telah melampaui target	Perlu upaya mempertahankan capaian kinerja
3	Meningkatnya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1 Persentase ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan	%	100	100	100	Telah mencapai target	Perlu upaya mempertahankan capaian kinerja
		2 Cakupan sarana farmasi yang dibina	%	80	80	100	Telah mencapai target	Perlu upaya mempertahankan capaian kinerja



Analisis efisiensi terhadap sumber daya berdasarkan Indikator Program sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.17
Analisis Efisiensi terhadap Sumber Daya
Di Dinas Kesehatan berdasarkan Indikator Program Tahun 2024

N O	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			
			TARGET	REALISAS I	% CAPAIA N	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAI AN	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)	(9)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	80	80	100	120.054.452.449	109.149.407.332	100	99,09
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata2 Capaian Kinerja UKM UKP	94,80	94,92	100	113.808.335.393	105.908.964.028	93	99,07



Akuntabilitas Kinerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)	(9)
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rata2 Capaian Kinerja SDM Kesehatan	90,00	90	100	13.064.577.000	10.805.227.642	100	99,17
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rata2 Capaian Kinerja SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	90	90	100	590.444.000	578.028.500	100	99,02
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rata2 Capaian Kinerja PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	47,50	53,37	112,35	455.420.000	433.958.000	112,35	99,15



Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan tingkat efisiensi program Dinas Kesehatan rata-rata mencapai 99%, sehingga anggaran tersebut efektif meningkatkan capaian kinerja Dinas Kesehatan tahun 2024.



Tabel 3.18
Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Program Dan Kegiatan

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang	Pengam pu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
1.1		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan	100	menunjang	Yankes
1.2		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	87,84	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan	100	menunjang	Kesmas
1.3		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	93,38	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya kegiatan	100	menunjang	Kesmas
1.4		Persentase bayi baru lahir mendapatkan	97,87	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan	Terlaksananya kegiatan	100	menunjang	Kesmas



Akuntabilitas Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang	Pengam pu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		pelayanan kesehatan bayi baru lahir		Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1.5		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	88,58					Kesmas
1.6		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100.00					Kesmas
1.7		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	89.44					P2P
1.8		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	85,08					Kesmas
1.9		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan	92.90					P2P



Akuntabilitas Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang	Pengam pu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		pelayanan kesehatan sesuai standar						
1.10		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99.33					P2P
1.11		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	107.45					P2P
1.12		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100					P2P
1.13		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100.00					P2P



Akuntabilitas Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang	Pengam pu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.14		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	87,84					Kesmas
1.15		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	93,38					Kesmas
1.16		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	97,87					Kesmas
1.17		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	88,58					Kesmas
1.18		Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100.00					Kesmas
1.19		Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan	89.44					P2P



Akuntabilitas Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang	Pengam pu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		pelayanan kesehatan						
1.20		Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100.00					Kesmas
1.21		Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	92.90					P2P
1.22		Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	99.33					P2P
1.23		Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	107.45					P2P



Akuntabilitas Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang	Pengam pu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.24		Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100					P2P
1.25		Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100.00					P2P
1.26		Rasio posyandu per satuan balita	46.57					Kesmas
1.27		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100.00					Kesmas
1.28		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki	94.38					Kesmas


Akuntabilitas Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang	Pengam pu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		kompetensi kebidanan						
1.29		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	78,6					P2P
1.30		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100.00					Kesmas
1.31		Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	95,2					P2P
1.32		Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	13,23					P2P
1.33		Cakupan balita pneumonia yang ditangani	90					P2P
1.34		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	86					P2P
1.35		Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	486					P2P
1.36		Tingkat kematian karena Tuberkulosis	2					P2P



Akuntabilitas Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang	Pengam pu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		(per 100.000 penduduk)						
1.37		Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	90					P2P
1.38		Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	90					P2P
1.39		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100					P2P
1.40		Penderita diare yang ditangani	100					P2P
1.41		Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	0.00					P2P
1.42		Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan	0.00					P2P


Akuntabilitas Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang	Pengam pu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		komprehensif tentang HIV/AIDS						
1.43		Cakupan kunjungan bayi	97,56					Kesmas
1.44		Cakupan puskesmas	117,65					SDK
1.45		Cakupan pelayanan nifas	69,1					Kesmas
1.46		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	79,96					Kesmas
1.47		Cakupan pelayanan anak balita	88,89					Kesmas
1.48		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100,00					Yankes
2	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan							
2.1		Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan	75	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan	100	menunjang	SDK
2.2		Persentase Ijin Praktik Tenaga	91,25	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan	Terlaksananya kegiatan	100	menunjang	SDK



Akuntabilitas Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang	Pengam pu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Kesehatan yang diterbitkan		Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				
2.3		Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	73,15	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan	100	menunjang	SDK
2.4		Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan	83,13					SDK
2.5		Rasio dokter per satuan penduduk	45					SDK
2.6		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	34,9					SDK
3	Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman							
3.1		Persentase Ijin Apotek, Toko Obat,	100.00	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat,	Terlaksananya kegiatan	100	menunjang	SDK



Akuntabilitas Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang	Pengam pu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan		Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				
3.2		Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina	80.00	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Terlaksananya kegiatan	100	menunjang	SDK
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya kegiatan	100	menunjang	
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	Terlaksananya kegiatan	100	menunjang	



Akuntabilitas Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang	Pengam pu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya kegiatan	100	menunjang	
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya kegiatan	100	menunjang	
4	Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan							
4.1		Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang kesehatan	6,73	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Terlaksananya kegiatan	100	menunjang	Kesmas



Akuntabilitas Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang	Pengam pu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
4.2		Persentase pembinaan kader/lembaga kesehatan masyarakat yang dibina	100.00	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan	100	menunjang	Kesmas
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan	100	menunjang	
5	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
5.1		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan	100	menunjang	Sekretariat
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan	100	menunjang	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan	100	menunjang	



Akuntabilitas Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang	Pengam pu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan	100	menunjang	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan	100	menunjang	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan	100	menunjang	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan	100	menunjang	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan	100	menunjang	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan	100	menunjang	



Akuntabilitas Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja	% Capaian	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang	Pengam pu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Peningkatan Pelayanan BLUD				



Selain Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta beserta jaringannya telah meraih berbagai prestasi dan penghargaan dalam capaian program kesehatan baik tingkat pusat, provinsi maupun tingkat Kabupaten Purwakarta. Adapun prestasi dan penghargaan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.19
Penghargaan/Prestasi Dinas Kesehatan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

No	Nama Penghargaan/Prestasi	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan
1	Penghargaan UHC Award atas dukungan dan kontribusi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan pencapaian Universal Health Coverage	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia	Kabupaten Purwakarta
2	Penghargaan Eradikasi Frambusia	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Kabupaten Purwakarta
3	Penghargaan Kabupaten/Kota dengan Pengendalian TBC dalam kategori capaian pemberian TPT Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Purwakarta
	Penghargaan Pengukuran Intervensi Serentak Pencegahan Stunting yang berhasil mencapai 100% sasaran	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Purwakarta
4	Penghargaan Terbaik ke IV Pengelola Risiko Perangkat Daerah semester I Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Purwakarta	Bupati Purwakarta	Dinas Kesehatan
5	Penghargaan Juara 3 Bale Sauyunan	Bupati Purwakarta	Dinas Kesehatan
6	Penghargaan Sertifikat Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Predikat Paripurna	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Purwakarta
7	Penghargaan Bidang Pengelolaan Aset	Bupati Purwakarta	Laboratorium Kesehatan



No	Nama Penghargaan/Prestasi	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan
			Daerah Kabupaten Purwakarta
8	Penghargaan Sertifikat SNI ISO/IEC 17025:2017 Akreditasi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi	Komite Akreditasi Nasional	Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Purwakarta
9	Penghargaan Penilaian kepatuhan Ombudsman dengan kategori kepatuhan Tertinggi	Ombudsman RI	UPTD Puskesmas Purwakarta
10	Penghargaan Penilaian kepatuhan Ombudsman dengan kategori kepatuhan Tertinggi	Ombudsman RI	UPTD Puskesmas Bungursari
11	Penghargaan Penilaian kepatuhan Ombudsman dengan kategori kepatuhan Tertinggi	Ombudsman RI	UPTD Puskesmas Koncara
12	Penghargaan Penilaian kepatuhan Ombudsman dengan kategori kepatuhan Tertinggi	Ombudsman RI	UPTD Puskesmas Cibatu
13	Penghargaan Juara 1 (Inovasi Alamanda's) Purwakarta Dalam Inovasi	Bupati Purwakarta	UPTD Puskesmas Munjuljaya
14	Penghargaan Harapan 2 (Inovasi SODA) Purwakarta Dalam Inovasi	Bupati Purwakarta	UPTD Puskesmas Munjuljaya
15	Penghargaan Juara 2 (Inovasi Stabil) Purwakarta Dalam Inovasi	Bupati Purwakarta	UPTD Puskesmas Bojong
16	Penghargaan Juara 3 (Inovasi Layangan Putus) Purwakarta Dalam Inovasi	Bupati Purwakarta	UPTD Puskesmas Maniis



3.2 REALISASI ANGGARAN

Selain indikator sasaran yang menjadi tolok ukur pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan. Maka realisasi anggaran juga mempunyai peranan dalam capaian keberhasilan indikator kinerja. Hal ini menjadi sangat penting untuk menunjang pelaksanaan operasional kegiatan dalam mendukung keberhasilan program pelayanan di Dinas Kesehatan. Adapun realisasi anggaran sekretariat, bidang-bidang, UPTD Perbekalan Kesehatan dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai berikut :



Tabel 3.20
Rincian Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan
Tahun 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU	REALISASI ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB
		TOTAL	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	191.380.733.755	179.138.473.514	93,60	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80.608.242.362	75.676.381.416	93,88	Sekretaris Dinas
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	178.564.800	129.276.700	72,40	Sekretaris Dinas
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.735.000	45.281.000	73,35	Ka. Tim Perencana
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	21.723.400	21.003.400	96,69	Ka. Tim Perencana
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.189.100	6.439.100	78,63	Ka. Tim Perencana
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.976.200	10.986.200	84,66	Ka. Tim Perencana
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.127.900	6.377.900	78,47	Ka. Tim Perencana
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.836.000	25.596.000	99,07	Ka. Tim Perencana
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.977.200	13.593.100	34,00	Ka. Tim Perencana
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70.827.045.895	66.735.239.437	94,30	Sekretaris Dinas



Akuntabilitas Kinerja

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU	REALISASI ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB
		TOTAL	%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70.612.045.895	66.583.195.037	94,29	Kasubbag Keuangan dan Aset
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.000.000	12.105.000	60,53	Kasubbag Keuangan dan Aset
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.000.000	44.615.600	99,15	Kasubbag Keuangan dan Aset
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.000.000	11.058.300	73,72	Kasubbag Keuangan dan Aset
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	45.000.000	28.962.600	64,36	Kasubbag Keuangan dan Aset
Pengeloan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	15.000.000	11.320.400	75,47	Kasubbag Keuangan dan Aset
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	55.000.000	31.140.400	56,62	Kasubbag Keuangan dan Aset
Penyusunan Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran	20.000.000	12.842.100	64,21	Kasubbag Keuangan dan Aset
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	75.000.000	56.145.609	74,86	Sekretaris Dinas
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah padaSKPD	25.000.000	25.000.000,00	100,00	Kasubbag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000	31.145.609,00	62,29	Kasubbag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	388.955.000	375.491.000	96,54	Sekretaris Dinas



Akuntabilitas Kinerja

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU	REALISASI ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB
		TOTAL	%	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100.000.000	98.850.000	98,85	Kasubbag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	93.955.000,00	93.955.000,00	100,00	Kasubbag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.000.000,00	16.426.000,00	82,13	Kasubbag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	20.000.000,00	19.248.000,00	96,24	Kasubbag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	30.000.000,00	28.892.000,00	96,31	Kasubbag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000,00	72.000.000,00	96,00	Kasubbag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	Kasubbag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000,00	21.120.000,00	84,48	Kasubbag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.765.804.830,00	1.578.106.596	89,37	Sekretaris Dinas
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	68.368.391,00	68.368.391	100,00	Kasubbag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	762.240.000,00	758.292.000	99,48	Kasubbag Kepegawaian, Umum dan Hukum



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU	REALISASI ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB
		TOTAL	%	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	129.726.439,00	129.724.939	100,00	Kasubbag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	268.500.000,00	265.500.000	98,88	Kasubbag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	80.375.766	80,38	Kasubbag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.000.000,00	55.581.000	74,11	Kasubbag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	341.970.000,00	200.539.000	58,64	Kasubbag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000,00	19.725.500	98,63	Kasubbag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.034.279.500	1.033.858.500	99,96	Sekretaris Dinas
Pengadaan Mebel	446.950.000	446.679.000	99,94	Kasubbag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	430.929.500	430.929.500	100,00	Kasubbag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	156.400.000	156.250.000	99,90	Kasubbag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.279.627.068	2.765.375.210	84,32	Sekretaris Dinas


Akuntabilitas Kinerja

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU	REALISASI ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB
		TOTAL	%	
penyediaan jasa surat menyurat	10.000.000	10.000.000	100,00	Kasubbag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	904.857.356	833.533.707	92,12	Kasubbag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.364.769.712	1.921.841.503	81,27	Kasubbag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.583.965.269	2.529.903.364	97,91	Sekretaris Dinas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	324.400.000	272.466.667	83,99	Kasubbag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.300.000	45.150.000	99,67	Kasubbag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.827.368.269	1.825.707.697	99,91	Kasubbag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	386.897.000	386.579.000	99,92	Kasubbag Kepegawaian, Umum dan Hukum
Peningkatan Pelayanan BLUD	475.000.000	472.985.000	99,58	Ka. UPTD Labkesda
Peningkatan Pelayanan BLUD (Labkesda)	475.000.000	472.985.000	99,58	Ka. UPTD Labkesda



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU	REALISASI ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB
		TOTAL	%	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	96.941.130.393	91.911.377.956	94,81	Sekretaris Dinas, Kabid P2P, Kabid Kesmas, Kabid Yankes, Kabid SDK, Ka. UPTD
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	41.059.073.178	38.217.281.193	93,08	Kabid. SDK
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	26.534.819.905	24.995.134.061	94,20	Ka.Tim Sarpras dan Alkes
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	7.527.680.235	7.463.459.735	99,15	Ka.Tim Sarpras dan Alkes
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	467.975.096	453.854.000	96,98	Ka.Tim Sarpras dan Alkes
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	86.756.000	86.390.000	99,58	Ka.Tim Sarpras dan Alkes
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	336.836.000	336.386.000	99,87	Ka.Tim Sarpras dan Alkes
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasyankes	5.902.322.442	4.697.309.397	81,07	Ka.Tim Sarpras dan Alkes
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman untuk Fasyankes.	202.683.500	184.748.000	91,15	Ka.Tim Sarpras dan Alkes


Akuntabilitas Kinerja

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU	REALISASI ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB
		TOTAL	%	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.237.679.315	53.111.610.263	96,15	Kabid P2P, Kabid Kesmas, Kabid Yankes, Ka.UPTD Perbekkes, Ka.UPTD Labkesda
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	74.380.000	49.662.000	66,77	Ka. TIm Survim
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luas Biasa (KLB)	20.000.000	1.166.000	5,83	Ka. TIm Survim
Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi pendudukterdampak krisis kesehatanAkibat Bencana dan/berpotensi bencana	138.917.500	138.917.500	100,00	Ka. TIm Survim
Pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan paska krisis Kesehatan	75.000.000	48.690.000	64,92	Ka. TIm Survim
Investigasi Awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan paska imunisasi dan pemberian obat massal)	54.000.000	34.668.000,00	64,20	Ka. TIm Survim
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.057.993.904	1.040.020.250	98,30	Ka. TIm P2PM
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	255.000.000	247.093.000	96,90	Ka. TIm P2PM
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular	351.800.000	330.725.000	94,01	Ka. TIm P2PM
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan tubercuosis	50.000.000	19.214.000	38,43	Ka. TIm P2PM
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	77.328.000	59.832.000	77,37	Ka. TIm P2PM
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	48.825.660	46.718.381	95,68	Ka. TIm P2PM



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU	REALISASI ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB
		TOTAL	%	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	591.827.200	531.615.150	89,83	Ka. Tim P2PTM
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	74.196.000	64.066.000	86,35	Ka. Tim P2PTM
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.146.000.000	1.132.787.325	98,85	Ka. Tim P2PTM
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	142.610.000	107.276.000	75,22	Ka. Tim P2PTM
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	59.421.000	52.241.000	87,92	Ka. Tim Kesga-Gizi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100.000.000	100.000.000	100,00	Ka. Tim Kesga-Gizi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.366.190.000	1.080.290.000	79,07	Ka. Tim Kesga-Gizi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	255.122.592	252.460.500	98,96	Ka. Tim Kesga-Gizi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	300.000.000	294.543.000	98,18	Ka. Tim Kesga-Gizi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	251.720.000	251.455.500	99,89	Ka. Tim Kesga-Gizi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	262.510.000	212.720.000	81,03	Ka. Tim Kesga-Gizi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	56.360.000	56.000.000	99,36	Ka. Tim Kesling Kerja OR



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU	REALISASI ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB
		TOTAL	%	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	765.360.000	759.260.000	99,20	Ka.Tim Kesling Kerja OR
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	50.000.000	46.507.000	93,01	Ka.Tim Kesling Kerja OR
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	568.837.000	542.790.100	95,42	Ka.Tim Promkes
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	45.425.872.950	44.053.567.300	96,98	Ka. Tim Rujukan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	40.000.000	39.882.000	99,71	Ka.Tim Kesprim- Kestrad
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (1.02.02.2.02.0038)	157.571.809	156.711.100	99,45	Ka. Tim Rujukan
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	49.999.700	49.519.000	99,04	Ka. Tim Mutu
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Perbekkes)	447.336.000	435.144.212	97,27	Ka. UPTD Perbekkes
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Labkesda)	923.500.000	876.068.945	94,86	Ka. UPTD Labkesda
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	264.813.600	253.277.200	95,64	Sekretaris Dinas
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	264.813.600	253.277.200	92,43	Ka. Tim Perencana
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	379.564.300	329.209.300	86,73	Kabid. Yankes



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU	REALISASI ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB
		TOTAL	%	
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	49.999.700	45.484.600	90,97	Ka. TIm Rujukan
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (1.02.02.2.04.0002)	49.999.900	45.932.200	91,86	Ka. TIm Rujukan
Pengendalian dan Pengawasan Serta tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya (1.02.02.2.04.0001)	49.999.800	44.950.200	89,90	Ka. TIm Rujukan
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	229.564.900	192.842.300	84,00	Ka. TIm Mutu
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	13.064.577.000	10.805.227.642	82,71	Kabid. SDK
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	100.000.000	91.948.000	93,20	Kabid. SDK
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	50.000.000	46.600.000	93,20	Ka.TIm SDM
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	50.000.000	45.348.000	90,70	Ka.TIm SDM
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	12.048.256.000	9.816.255.142	81,47	Kabid. SDK
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	50.000.000	50.000.000	100,00	Ka.TIm SDM


Akuntabilitas Kinerja

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU	REALISASI ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB
		TOTAL	%	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	11.632.380.000	9.411.332.542	80,91	Ka.TIm SDKM
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	365.876.000	354.922.600	97,01	Ka.TIm SDKM
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	916.321.000	897.024.500	97,89	Kabid. SDK
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	916.321.000	897.024.500	97,89	Ka.TIm SDKM
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	590.444.000	578.028.500	97,90	Kabid. SDK
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	113.330.000	111.575.000	98,45	Kabid. SDK
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	113.330.000	111.575.000	98,45	Ka. TIm Farmasi
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	158.600.000	158.400.000	99,87	Kabid. SDK



Akuntabilitas Kinerja

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU	REALISASI ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB
		TOTAL	%	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	158.600.000	158.400.000	99,87	Ka. Tim Farmasi
Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	233.514.000	232.326.000	99,49	Kabid. SDK
Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	233.514.000	232.326.000	-	Ka. Tim Farmasi
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	50.000.000	48.460.000	96,92	Kabid Kesmas
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	50.000.000	48.460.000	96,92	Ka.Tim Kesling Kerja OR
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	35.000.000	27.267.500	77,91	Kabid Kesmas
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	35.000.000	27.267.500	77,91	Ka.Tim Kesling Kerja OR
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	176.340.000	167.458.000	94,96	Kabid Kesmas


Akuntabilitas Kinerja

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU	REALISASI ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB
		TOTAL	%	
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000	42.845.000	95,21	Kabid Kesmas
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	45.000.000	42.845.000	95,21	Ka.Tim Promkes
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.160.000	68.925.000	99,66	Kabid Kesmas
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	19.160.000	19.150.000	99,95	Ka.Tim Promkes
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat	50.000.000	49.775.000	99,55	Ka.Tim Promkes
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	62.180.000	55.688.000	89,56	Kabid Kesmas
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	62.180.000	55.688.000	89,56	Ka.Tim Promkes



Tabel 3.21
Rincian Realisasi Anggaran Per UPTD Puskesmas Tahun 2024

No	Nama Puskesmas	Jml Program	Jml Kegiatan	Jml Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
						Anggaran (Rp)	(%)
1	Purwakarta	3	3	19	2.579.328.918	2.249.088.913	87,20
2	Munjuljaya	2	2	19	2.359.620.552	1.959.214.635	83,03
3	Maracang	3	3	19	1.907.253.290	1.522.013.620	79,80
4	Mulyamekar	3	3	19	1.827.015.000	1.560.720.443	85,42
5	Jatiluhur	3	3	19	3.165.973.928	2.828.364.544	89,34
6	Campaka	3	3	19	2.252.827.257	1.861.414.671	82,63
7	Bungursari	3	3	19	2.045.916.520	1.675.513.807	81,90
8	Cibatu	3	3	19	2.450.276.920	1.945.822.555	79,41
9	Pasawahan	3	3	19	2.876.071.080	2.320.063.331	80,67
10	Pondoksalam	3	3	19	2.214.856.302	1.875.687.237	84,69
11	Wanayasa	2	2	19	3.621.229.900	3.176.854.470	87,73
12	Kiarapedes	3	3	19	2.325.325.652	2.060.476.629	88,61
13	Sukatani	3	3	19	4.090.410.745	3.332.138.742	81,46
14	Darangdan	3	3	19	4.375.649.900	3.608.853.150	82,48
15	Bojong	3	3	19	3.474.485.000	3.087.164.654	88,85
16	Plered	3	3	19	4.652.545.000	4.030.960.452	86,64
17	Tegalwaru	3	3	19	3.794.495.847	2.963.736.178	78,11
18	Maniis	3	3	19	3.161.121.560	2.770.848.783	87,65
19	Sukasari	2	2	19	1.470.802.716	1.293.463.365	87,94
20	Koncara	3	3	19	1.947.289.000	1.614.711.809	82,92
TOTAL					56.592.495.087	47.737.111.988	84,35



**Tabel 3.22
Rincian Realisasi Anggaran UPTD Puskesmas Per Sub Kegiatan
Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Anggaran (Rp)	(%)
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	16.867.205.000	13.997.586.072	82,99
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.867.205.000	13.997.586.072	82,99
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	636.522.000	622.100.000	97,73
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	455.129.000	396.023.000	87,01
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	173.037.000	170.178.985	98,35
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	749.700.000	679.200.000	90,60
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	111.940.000	111.740.000	99,82
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	160.250.000	157.150.000	98,07
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	119.000.000	117.800.000	98,99
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.125.746.000	2.665.106.415	64,60
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	303.691.000	297.764.000	98,05
10	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	529.826.000	489.399.909	92,37
11	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.018.575.000	2.988.843.400	99,02
12	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.808.345.000	3.776.571.363	78,54
13	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	101.807.000	77.100.000	75,73
14	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	81.400.000	82.000.000	100,74
15	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	29.700.000	29.700.000	100,00



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Anggaran (Rp)	(%)
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	190.941.000	187.381.000	98,14
17	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.271.596.000	1.149.528.000	90,40
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	279.080.000	266.500.000	95,49
1	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	279.080.000	266.500.000	95,49
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	279.080.000	266.500.000	95,49
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.446.210.087	33.473.025.916	84,86
1	Peningkatan Pelayanan BLUD	39.446.210.087	33.473.025.916	84,86
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	39.446.210.087	33.473.025.916	84,86
TOTAL		56.592.495.087	47.737.111.988	84,35

Berdasarkan pagu anggaran sebesar Rp 247.973.228.842 terdiri dari APBD Kabupaten, DAK Fisik, DAK Non Fisik (BOK Puskesmas), DBHCHT dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat. Dimana realisasi anggaran sebesar 91,49 %.



Tabel 3.23
Rincian Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA				ANGGARAN		
	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)	PAGU	REALISASI	%
DINAS KESEHATAN				99,05	247.973.228.842	226.875.585.502	91,49
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen		-	98,43	120.054.452.449	109.149.407.332	90,92
Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	100	120.054.452.449	109.149.407.332	90,92
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	178.564.800	129.276.700	72,40
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	4	4	100,00	61.735.000	45.281.000	73,35
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	2	2	100,00	21.723.400	21.003.400	96,69
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	2	2	100,00	8.189.100	6.439.100	78,63
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dokumen	2	2	100,00	12.976.200	10.986.200	84,66
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	dokumen	2	2	100,00	8.127.900	6.377.900	78,47
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100,00	25.836.000	25.596.000	99,07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100,00	39.977.200	13.593.100	34,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	99,88	70.827.045.895	66.735.239.437	94,30
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	846	834	99,00	70.612.045.895	66.583.195.037	94,29
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	1	1	100,00	20.000.000	12.105.000	60,53



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA				ANGGARAN		
	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)	PAGU	REALISASI	%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	12	100,00	45.000.000	44.615.600	99,15
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	1	1	100,00	15.000.000	11.058.300	73,72
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	12	100,00	45.000.000	28.962.600	64,36
Pengeloan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	dokumen	1	1	100,00	15.000.000	11.320.400	75,47
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18	100,00	55.000.000	31.140.400	56,62
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1	1	100,00	20.000.000	12.842.100	64,21
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	75.000.000	56.145.609,00	74,86
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100,00	25.000.000	25.000.000,00	100,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100,00	50.000.000	31.145.609,00	62,29
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	89,50	89,50	388.955.000	375.491.000	96,54
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	7	7	100,00	100.000.000	98.850.000	98,85
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	1	100,00	93.955.000,00	93.955.000,00	100,00



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA				ANGGARAN		
	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)	PAGU	REALISASI	%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	100,00	20.000.000,00	16.426.000,00	82,13
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	100,00	20.000.000,00	19.248.000,00	96,24
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	100,00	30.000.000,00	28.892.000,00	96,31
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	77	12	16,00	75.000.000,00	72.000.000,00	96,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	56	56	100,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	21	21	100,00	25.000.000,00	21.120.000,00	84,48
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	1.765.804.830,00	1.578.106.596	89,37
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	100,00	68.368.391,00	68.368.391	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	1	100,00	762.240.000,00	758.292.000	99,48
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	1	1	100,00	129.726.439,00	129.724.939	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	1	1	100,00	268.500.000,00	265.500.000	98,88
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	1	1	100,00	100.000.000,00	80.375.766	80,38
Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100,00	75.000.000,00	55.581.000	74,11
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100,00	341.970.000,00	200.539.000	58,64
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100,00	20.000.000,00	19.725.500	98,63



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA				ANGGARAN		
	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)	PAGU	REALISASI	%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	1.034.279.500	1.033.858.500	99,96
Pengadaan Mebel	Unit	1	1	100,00	446.950.000	446.679.000	99,94
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	1	100,00	430.929.500	430.929.500	100,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	1	100,00	156.400.000	156.250.000	99,90
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	3.279.627.068	2.765.375.210	84,32
penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1	100,00	10.000.000	10.000.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	1	1	100,00	904.857.356	833.533.707	92,12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	100,00	2.364.769.712	1.921.841.503	81,27
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	96,5	96,50	2.583.965.269	2.529.903.364	97,91
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	70	60	86,00	324.400.000	272.466.667	83,99
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	1	1	100,00	45.300.000	45.150.000	99,67
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	1	100,00	1.827.368.269	1.825.707.697	99,91
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	1	100,00	386.897.000	386.579.000	99,92



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA				ANGGARAN		
	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)	PAGU	REALISASI	%
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persen	100,00	100,00	100,00	39.921.210.087	33.946.010.916	85,03
Peningkatan Pelayanan BLUD (Labkesda)	Dokumen	1	1	100,00	475.000.000	472.985.000	99,58
Peningkatan Pelayanan BLUD (Puskesmas)	Dokumen	1	1	100,00	39.446.210.087	33.473.025.916	84,86
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persen		-	100,94	113.808.335.393	105.908.964.028	93,06
Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	50	100	200,00	429.564.000	378.728.300	88,17
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	87,75	87,75	695.943.000	674.341.000	96,90
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	93,33	93,33	555.129.000	496.023.000	89,35
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	97,55	97,55	1.366.190.000	1.080.290.000	79,07
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	88,89	88,89	428.159.592	422.639.485	98,71
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100,00	1.049.700.000	973.743.000	92,76
Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	89,44	89,44	703767200	643355150	91,42



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA				ANGGARAN		
	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)	PAGU	REALISASI	%
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	91,3	91,30	251.720.000	251.455.500	99,89
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	80	92,9	116,13	74.196.000	64.066.000	86,35
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	99,33	99,33	1.146.000.000	1.132.787.325	98,85
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	107,45	107,45	142.610.000	107.276.000	75,22
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	95	100	105,26	1.218.243.904	1.197.170.250	98,27
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	80	100	125,00	374.000.000	364.893.000	97,56
Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	87,75	87,75	695.943.000	674.341.000	96,90
Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	93,33	93,33	555.129.000	496.023.000	89,35
Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	97,55	97,55	1.366.190.000	1.080.290.000	79,07



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA				ANGGARAN		
	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)	PAGU	REALISASI	%
Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	88,89	88,89	428.159.592	422.639.485	98,71
Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100	100,00	1.049.700.000	973.743.000	92,76
Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	89,44	89,44	703.767.200	643.355.150	91,42
Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	100	100,00	251.720.000	251.455.500	99,89
Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	92,9	92,90	74.196.000	64.066.000	86,35
Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	99,33	99,33	1.146.000.000	1.132.787.325	98,85
Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	100	107,05	107,05	142.610.000	107.276.000	75,22
Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	95	95,75	100,79	1.218.243.904	1.197.170.250	98,27
Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	80	100	125,00	374.000.000	364.893.000	97,56
Rasio posyandu per satuan balita	Poin	17,34	46,57	268,57	568.837.000	542.790.100	95,42



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA				ANGGARAN		
	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)	PAGU	REALISASI	%
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100	100	100,00	555.129.000	496.023.000	89,35
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	100	94,38	94,38	555.129.000	496.023.000	89,35
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	100	78,6	78,60	604.206.000	539.061.909	89,22
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100,00	4.388.256.000	2.877.826.415	65,58
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	100	92,5	92,50	604.206.000	539.061.909	89,22
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Persen	100	100	100,00	604.206.000	539.061.909	89,22
Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	70	90	128,6	3.370.375.000	3.319.568.400	98,49
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	90	86	95,56	1.218.243.904	1.197.170.250	98,27
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Poin	245,65	429,19	174,72	1.218.243.904	1.197.170.250	98,27
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Poin	2,58	9,33	361,63	1.218.243.904	1.197.170.250	98,27
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	90	87	96,67	1.218.243.904	1.197.170.250	98,27



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA				ANGGARAN		
	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)	PAGU	REALISASI	%
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	90	80	88,89	1.218.243.904	1.197.170.250	98,27
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100,00	3.370.375.000	3.319.568.400	98,49
Penderita diare yang ditangani	Persen	85	100	117,65	3.370.375.000	3.319.568.400	98,49
Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	Rasio	100	0	0	481.028.000	454.425.000	94,47
Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	80	0	0	481.028.000	454.425.000	94,47
Cakupan kunjungan bayi	Persen	100	97,56	97,56	2.637.786.000	2.229.818.000	84,53
Cakupan puskesmas	Persen	100	117,65	117,65	41.059.073.178	38.217.281.193	93,08
Cakupan pelayanan nifas	Persen	100	69,10	69,10	555.129.000	496.023.000	89,35
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	100	79,96	79,96	1.366.190.000	1.080.290.000	79,07
Cakupan pelayanan anak balita	Persen	100	88,89	88,89	428.159.592	422.639.485	98,71
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100	100	100,00	7.376.137.338	6.087.896.697	82,54
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	41.059.073.178	38.217.281.193	93,08
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	23	23	100,00	26.534.819.905	24.995.134.061	94,20



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA				ANGGARAN		
	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)	PAGU	REALISASI	%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Unit	3	3	100,00	7.527.680.235	7.463.459.735	99,15
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	2	2	100,00	467.975.096	453.854.000	96,98
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Unit	6	6	100,00	86.756.000	86.390.000	99,58
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	kegiatan	6	6	100,00	336.836.000	336.386.000	99,87
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasyankes	paket	1	1	100,00	5.902.322.442	4.697.309.397	81,07
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman untuk Fasyankes.	paket	1	1	100,00	202.683.500	184.748.000	91,15
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	103,77	103,77	72.104.884.315	67.109.196.335	93,07
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	100,00	604.206.000	539.061.909	89,22
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen	1	1	100,00	20.000.000	1.166.000	5,83
Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi pendudukterdampak krisis kesehatan Akibat Bencana dan/berpotensi bencana	Dokumen	1	1	100,00	138.917.500	138.917.500	100,00
Pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan paska krisis Kesehatan	Dokumen	5	5	100,00	75.000.000	48.690.000	64,92
Investigasi Awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan paska imunisasi dan pemberian obat massal)	Laporan	1	1	100,00	155.807.000	111.768.000,00	71,73



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA				ANGGARAN		
	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)	PAGU	REALISASI	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	27.188	28574	105,10	1.218.243.904	1.197.170.250	98,27
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	23675	24724	104,43	374.000.000	364.893.000	97,56
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular	Dokumen	1	1	100,00	3.370.375.000	3.319.568.400	98,49
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan tubercuosis	Orang	5.594	4508	80,59	131.400.000	101.214.000	77,03
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Orang	1.101	295	26,79	107.028.000	89.532.000	83,65
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Dokumen	1	1	100,00	48.825.660	46.718.381	95,68
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang	514863	460517	89,44	703.767.200	643.355.150	91,42
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang	76.654	71217	92,91	74.196.000	64.066.000	86,35
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang	14348	14525	101,23	1.146.000.000	1.132.787.325	98,85
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	1346	1441	107,06	142.610.000	107.276.000	75,22
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	17.747	16973	95,64	695.943.000	674.341.000	96,90
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	16.941	17943	105,91	555.129.000	496.023.000	89,35
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	16.151	18001	111,45	1.366.190.000	1.080.290.000	79,07



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA				ANGGARAN		
	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)	PAGU	REALISASI	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang	77.497	79907	103,11	428.159.592	422.639.485	98,71
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	142.039	154632	108,87	1.049.700.000	973.743.000	92,76
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	106.210	97654	91,94	251.720.000	251.455.500	99,89
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	1	100,00	4.388.256.000	2.877.826.415	65,58
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	2	2	100,00	56.360.000	56.000.000	99,36
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	1	100,00	1.069.051.000	1.057.024.000	98,87
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	dokumen	1	1	100,00	50.000.000	46.507.000	93,01
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	1	100,00	568.837.000	542.790.100	95,42
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	1	1	100,00	45.425.872.950	44.053.567.300	96,98
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	dokumen	1	1	100,00	40.000.000	39.882.000	99,71
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	dokumen	1	1	100,00	190.941.000	187381000	98,14
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	dokumen	1	1	100,00	1.271.596.000	1149528000	90,40
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	unit	34	34	100,00	157.571.809	156.711.100	99,45
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	unit	45	45	100,00	49.999.700	49.519.000	99,04
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Perbekkes)	Dokumen	1	1	100,00	447.336.000	435.144.212	97,27



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA				ANGGARAN		
	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)	PAGU	REALISASI	%
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Labkesda)	Dokumen	1	1	100,00	923.500.000	876.068.945	94,86
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Puskesmas)	Dokumen	1	1	100,00	4.808.345.000	3.776.571.363	78,54
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persen	100,00	100,00	100,00	264.813.600	253.277.200	95,64
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen	1	1	100,00	264.813.600	253.277.200	92,43
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	379.564.300	329.209.300	86,73
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	dokumen	2	2	100,00	49.999.700	45.484.600	90,97
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (1.02.02.2.04.0002)	unit	45	45	100,00	49.999.900	45.932.200	91,86
Pengendalian dan Pengawasan Serta tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya (1.02.02.2.04.0001)	unit	8	8	100,00	49.999.800	44.950.200	89,90
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	unit	45	45	100,00	229.564.900	192.842.300	84,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persen	-	-	95,87	13.064.577.000	10.805.227.642	82,71



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA				ANGGARAN		
	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)	PAGU	REALISASI	%
Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan	Persen	30	75	250,00	12.964.577.000	10.713.279.642	82,64
Persentase Ijin Praktik Tenaga Kesehatan yang diterbitkan	Persen	30	91,25	304,17	100.000.000	91.948.000	91,95
Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	30	73,15	243,83	12.048.256.000	9.816.255.142	81,47
Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan	Persen	30	83,13	277,10	50.000.000	50.000.000	100,00
Rasio dokter per satuan penduduk	Poin	30	45	150,00	12.048.256.000	9.816.255.142	81,47
Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Poin	30	34,9	116,33	50.000.000	50.000.000	100,00
Pemberian Ijin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persen	-	-	100,00	100.000.000	91.948.000	93,20
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	1	1	100,00	50.000.000	46.600.000	93,20
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	1	1	100,00	50.000.000	45.348.000	90,70
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persen	100	87,60	87,60	12.048.256.000	9.816.255.142	81,47
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	100,00	50.000.000	50.000.000	100,00
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Orang	438	275,00	62,79	11.632.380.000	9.411.332.542	80,91



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA				ANGGARAN		
	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)	PAGU	REALISASI	%
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	5	5	100,00	365.876.000	354.922.600	97,01
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100,00	916.321.000	897.024.500	97,89
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	295	295	100,00	916.321.000	897.024.500	97,89
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persen	-	-	100,00	590.444.000	578.028.500	97,90
Persentase Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan	Persen	100	100	100,00	113.330.000	111.575.000	98,45
Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina	Persen	80	80	100,00	113.330.000	111.575.000	98,45
Pemberian Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persen	100	100	100,00	113.330.000	111.575.000	98,45
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	5	5	100,00	113.330.000	111.575.000	98,45
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persen	100	100	100,00	158.600.000	158.400.000	99,87



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA				ANGGARAN		
	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)	PAGU	REALISASI	%
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	1	1	100,00	158.600.000	158.400.000	99,87
Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Persen	100	100	100,00	233.514.000	232.326.000	99,49
pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Unit	5	5	100,00	233.514.000	232.326.000	-
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persen	100	100	100,00	50.000.000	48.460.000	96,92
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	dokumen	1	1	100,00	50.000.000	48.460.000	96,92
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persen	100	100	100,00	35.000.000	27.267.500	77,91
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	dokumen	1	1	100,00	35.000.000	27.267.500	77,91
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persen	0	0	100,00	455.420.000	433.958.000	95,29



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	KINERJA				ANGGARAN		
	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)	PAGU	REALISASI	%
Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang kesehatan	Persen	6	6,73	112,17	114.160.000	111.770.000	97,91
Persentase pembinaan kader/lembaga kesehatan masyarakat yang dibina	Persen	89	100	112,36	341.260.000	322.188.000	94,41
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100,00	45.000.000	42.845.000	95,21
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen	1	1	100,00	45.000.000	42.845.000	95,21
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100,00	69.160.000	68.925.000	99,66
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dokumen	1	1	100,00	19.160.000	19.150.000	99,95
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat	dokumen	1	1	100,00	50.000.000	49.775.000	99,55
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100,00	341.260.000	322.188.000	94,41
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	1	100,00	341.260.000	322.188.000	94,41



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Kesehatan. Dalam penyusunan LAKIP Tahun 2024 menggunakan metoda yang berdasarkan pada pencapaian sasaran dengan menggunakan analisa dari indikator sasaran.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lingkup kesehatan menunjukkan arah yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak periode 2024 hingga 2026. Dari hasil analisis terhadap sasaran dan program diperoleh gambaran yang menunjukkan hasil-hasil sebagai berikut:

- 1) Sasaran tujuan sesuai dengan tujuan Dinas Kesehatan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dimana berdasarkan indikator yaitu umur harapan hidup, dimana targetnya sebesar 71,51 dan diperkirakan target tersebut akan tercapai 100%. Namun hasil finalnya masih menunggu hasil resmi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, dimana target tersebut diperkirakan dapat tercapai sehingga persentasenya bisa menjadi 100%.
- 2) Sasaran Dinas Kesehatan sebagai turunan dari tujuan kesehatan yaitu meningkatkan aksesibilitas dan mutu



pelayanan kesehatan, dimana berdasarkan indikator utama indikator persentase UHH, Cakupan Indeks Pencapaian (IP) SPM Kesehatan, Capaian SAKIP Perangkat Daerah, dan Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai kategori sangat tinggi, dimana tiga indikator mencapai 100% dan satu indikator yang belum mencapai target namun cakupan diatas 90% yaitu cakupan indeks pencapaian SPM mencapai 92,90%.

- 3) Sasaran program menunjukkan terdapat 46 indikator dari 5 program dengan capaian:
 - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang diampu semua bidang dan sekretariat dimana menunjukkan 11 indikator diatas target, 6 indikator mencapai target, 8 indikator diatas 90%, 6 indikator antara 80-90%, 2 indikator antara 70-80% dan 2 indikator tidak ada datanya karena tidak ada anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut yang perlu dilakukan melalui survey.
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang diampu oleh Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari 6 indikator menunjukkan hanya 2 indikator yang tidak mencapai target, namun capaiannya diatas 80% dan mendekati 100% yaitu 88,24% dan 97,53%.
 - c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan yang diampu bidang Sumber Daya Kesehatan menunjukkan kedua indikator telah mencapai 100%



- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang diampu oleh Bidang Kesehatan menunjukkan kedua indikator telah mencapai target 100%
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diampu oleh Sekretariat diperkirakan mencapai target 100%, namun hasil akhirnya masih menunggu hasil review SAKIP Dinas Kesehatan oleh APIP.

Dari hasil capaian tersebut secara umum telah mencapai target yang sudah ditentukan. Namun adanya target yang harus mencapai 100% menjadi tantangan serta perlu dukungan yang maksimal baik dari sisi input seperti sumber daya manusia yang cukup dan kompetitif, sarana prasarana serta anggaran yang memadai serta dukungan lintas sektor dan peran aktif masyarakat sebagai subyek pembangunan maupun penerima manfaat dari program kesehatan tersebut.

Untuk itu ke depan maka langkah strategis, sinergitas dan dan konektifitas antar pelaku pembangunan kesehatan menjadi sangat penting. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kesehatan, peningkatan kualitas dan pemenuhan kuantitas SDM kesehatan, serta sarana pendukung harus menjadi prioritas pembangunan kesehatan. Peningkatan dan pemenuhan SDM kesehatan bukan hanya terbatas pada tenaga kesehatan, tetapi juga tenaga pendukung pelayanan kesehatan baik baik dalam pelayanan langsung maupun tidak langsung termasuk administrasi dan manajemen kesehatan.

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi Dinas Kesehatan maka perlu dilakukan upaya-upaya antara lain:



- a. Sosialisasi dan pemahaman serta pembagian tugas yang jelas untuk pengukuran kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang mencakup semua pegawai;
- b. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaporan kinerja yang disampaikan secara berjenjang dan berkala sesuai dengan tujuan organisasi;
- c. Pengukuran kinerja harus bisa disinergikan dengan program baik lokal, regional dan nasional serta dikaitkan dengan penilaian kinerja pegawai sehingga dapat memudahkan dalam penilaian pegawai maupun capaian organisasi;
- d. Pimpinan pada unit bidang, sekretariat maupun UPTD melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja bidang/sekretariat maupun UPTD serta melaporkan kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- e. Pimpinan melakukan agenda pertemuan secara berkala untuk memantau, mengevaluasi serta mengendalikan terhadap capaian kinerja organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Demikian, simpulan umum yang bisa disampaikan atas capaian kinerja organisasi Dinas Kesehatan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kinerja organisasi Dinas Kesehatan sesuai dengan tujuan "meningkatkan derajat kesehatan masyarakat".



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				207.133.828.294				210.083.400.856
1.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah		A	106.523.567.079	APBD Kab Purwakarta		A	108.231.163.570
1.02.01.1.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan,	Kabupaten Purwakarta	100	380.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	400.000.000
1.02.01.1.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan,	Kabupaten Purwakarta	100	65.135.976.463	APBD Kab Purwakarta		100	67.239.846.610
1.02.01.1.03	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik	Kabupaten Purwakarta	100	305.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	342.500.000
1.02.01.1.05	Kegiatan :Administrasi Kepegawaian Perangkat	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Purwakarta	100	360.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	370.000.000
1.02.01.1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	Kabupaten Purwakarta	100	1.195.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	745.000.000
1.02.01.1.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik	Kabupaten Purwakarta	100	1.500.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	1.500.000.000
1.02.01.1.08	Kegiatan :Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang	Kabupaten Purwakarta	100	3.538.168.000	APBD Kab Purwakarta		100	3.538.168.000
1.02.01.1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik	Kabupaten Purwakarta	100	513.773.656	APBD Kab Purwakarta		100	500.000.000
1.02.01.1.10	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan	Kabupaten Purwakarta	100	33.595.648.960	APBD Kab Purwakarta		100	33.595.648.960
1.02.02	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk		0,15	86.109.252.055	APBD Kab Purwakarta		0,15	87.281.228.126
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi		45,45				54,55	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100				100	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		98,37				98,67	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		99,65				99,93	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		72,77				74,05	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		41,50				42,28	
		Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		84,58				86,12	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		67,67				68,64	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		68,57				72,89	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		95,25				96,09	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		94,25				97,24	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		98,58				99,09	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		86				96	
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan		100				100	
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan		98,37				98,67	
		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan		99,10				99,38	
		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan		72,77				74,05	
		Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan		41,50				42,28	
		Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		68,57				72,89	
		Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan		95,25				96,09	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan		94,25				97,24	
		Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan		98,58				99,09	
		Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan		86				96	
		Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan		125				95	
		Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan		12				9	
		Penurunan Incidence Rate Kasus TBC (per 100.000 penduduk)		125				95	
		Penurunan Angka Kematian Kasus TBC (per 100.000 penduduk)		12				9	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		4				4	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Angka kelangsungan hidup bayi		0,44				0,44	
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup		99,61				99,61	
		Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup		105				100	
		Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup		105				100	
		Rasio posyandu per satuan balita		12				12	
		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		0,191				0,191	
		Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		0,011				0,010	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		98				98	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		98,2				98,4	
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		100				100	
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		100				100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)		tidak ada data karena tidak ada sub kegiatan survei/ penelitian untuk mengukur tersebut				tidak ada data	
		Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak		100				100	
		Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk		100				100	
		Cakupan balita pneumonia yang ditangani		70				80	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA		90				95	
		Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		246				209	
		Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		3				2	
		Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS		90				95	
		Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS		90				90	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		100				100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penderita diare yang ditangani		85				90	
		Angka kejadian Malaria		0				0	
		Tingkat kematian akibat malaria		0				0	
		Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida		100				100	
		Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat		100				100	
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi		< 0,015				< 0,014	
		Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir		100				4;4	
		Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS		70				80	
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		100				100	
		Cakupan kunjungan bayi		100				100	
		Cakupan puskesmas		118				118	
		Cakupan pembantu puskesmas		26				26	
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4		100				100	
		Cakupan pelayanan nifas		100				100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani		76,1				76,3	
		Cakupan pelayanan anak balita		71,3				71,5	
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin		100				100	
		Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat		100				100	
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		100				100	
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)		100				100	
		Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		0				0	
		Persentase desa/kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan		91				92	
		Persentase sarana air minum yang diawasi /diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar		60				60,5	
		Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar		21				22	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase tempat tempat dan fasilitas umum(TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar		62				63	
1.02.02.2.01.	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Purwakarta	100	15.737.118.303	APBD Kab Purwakarta		100	15.737.118.303
1.02.02.2.02	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Purwakarta	100	69.962.133.752	APBD Kab Purwakarta		100	71.099.109.823
1.02.02.2.03	Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Kabupaten Purwakarta	100	210.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	245.000.000
1.02.02.2.04	Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	100	200.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	200.000.000
1.02.03	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan		30	13.201.009.160	APBD Kab Purwakarta		30	13.201.009.160
		Persentase Ijin Praktik Tenaga Kesehatan yang diterbitkan		30				30	
		Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar		30				30	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan		30				30	
		Rasio dokter per satuan penduduk		30				30	
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk		30				30	
1.02.03.2.01	Kegiatan : Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Kegiatan Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Purwakarta	100	100.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	100.000.000
1.02.03.2.02	Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Purwakarta	100	12.901.009.160	APBD Kab Purwakarta		100	12.901.009.160
1.02.03.2.03	Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Kabupaten Purwakarta	100	200.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	200.000.000
1.02.04	Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan		100	620.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	685.000.000
		Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina		80				82	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.04.2.01	Kegiatan : Pemberian Izin Apotik Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tadisional (UMOT)	Terlaksananya Kegiatan Pemberian Izin Apotik Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tadisional (UMOT)	Kabupaten Purwakarta	100	115.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	130.000.000
1.02.04.2.02	Kegiatan : Pemberian Sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Terlaksananya Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kabupaten Purwakarta	100	420.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	450.000.000
1.02.04.2.03	Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kabupaten Purwakarta	100		APBD Kab Purwakarta		100	0
1.02.04.2.04	Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kabupaten Purwakarta	100	50.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	60.000.000
1.02.04.2.05	Kegiatan : Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kabupaten Purwakarta	100	35.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	45000000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.04.2.06	Kegiatan :Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Kabupaten Purwakarta	100		APBD Kab Purwakarta		100	
1.02.05	Program : Pemberdayaan Masyarakat Kepala Bidang Kesehatan	Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat diKepala Bidang kesehatan		6	680.000.000	APBD Kab Purwakarta		8	685.000.000
		Persentase pembinaan kader/lembaga kesehatan masyarakat yang dibina		89				96	
		Jumlah penerapan kebijakan Germas		4				4	
		Persentase posyandu aktif		85				90	
		Jumlah pedoman/regulasi/rekomendasi kebijakan penerapan Germas		15				18	
		Persentase melaksanakan pembinaan posyandu aktif		50				60	
1.02.05.2.01	Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	100	45.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	50.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.05.2.02	Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	100	615.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	610.000.000
1.02.05.2.03	Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	100	20.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	25.000.000

Purwakarta, Januari 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA



dr. H. Don Darmawan, MARS
Pembina Tk. I

NIP. 19750913 200604 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KESEHATAN

Jalan Veteran No. 60 Telepon (0264) 206531 Faks. 211747
PURWAKARTA

Kode Pos 41115

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 050.1/276 - Dinkes/IX/2024

TENTANG
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah pembangunan kesehatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2024 – 2026 perlu adanya perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 di lingkungan Dinas Kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
26. Peraturan Bupati Nomor 143 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Urusan Wajib Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 143);
27. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 30);
28. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten

Purwakarta Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 70).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat IKU Dinas Kesehatan adalah acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purwakarta
Pada tanggal : November 2024



**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA,**

H. Deni Darmawan dr., MARS
NIP 197509132006041008

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 050.1/276 - Dinkes/IX/2024
TANGGAL : 30 September 2024
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN 2024-2026

Nama Unit Organisasi	:	Dinas Kesehatan
Tugas	:	Melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
Fungsi	:	a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan; d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang kesehatan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Indikator Kinerja Utama	:	

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
A.	Tujuan			
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	<p>Formulasi Perhitungan : Umur Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu(e^0) disebut juga dengan Angka Harapan Hidup saat lahir (life expectancy at birth) Dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) atau dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack Tipe Data : Indeks (Tahun) Sumber Data : Badan Pusat Statistik</p>	Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
B.	Sasaran Utama/ Strategis			
	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	1. Umur Harapan Hidup	<p>Formulasi Perhitungan : Umur Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu(e^0) disebut juga dengan Angka Harapan Hidup saat lahir (life expectancy at birth)</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
			<p>Dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) atau dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack</p> <p>Tipe Data : Indeks (Tahun)</p> <p>Sumber Data : Badan Pusat Statistik</p>	
		<p>2. Cakupan Indeks Pencapaian (IP) SPM Kesehatan</p>	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Indeks pencapaian SPM (IP_{SPM}) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.</p> $IP_{SPM} = (\text{Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar} \times \text{BM}) + (\text{Persentase pencapaian penerima layanan dasar} \times \text{BP})$ <p>Keterangan:</p> <p>IP_{SPM} = Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018.</p> <p>Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis</p> <p>Persentase pencapaian penerima layanan dasar = Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan didalam lampiran Permendagri ini.</p> <p>BM = Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20</p>	<p>Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026</p>

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
			<p>BP = Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80</p> <p>Kategori Nilai IP_{SPM}</p> <p>100 : Tuntas Paripurna=Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100</p> <p>90-99: Tuntas Utama : Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99</p> <p>80-89 : Tuntas Madya =Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89</p> <p>70-79 : Tuntas Pratama=Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79</p> <p>60-69 : Tuntas Muda =Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69</p> <p><60 : Belum Tuntas=Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60</p> <p>Tipe Data : Indeks (komposit) Sumber Data : Badan Pusat Statistik</p>	
C	Tujuan			
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen (perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket																									
	Bersih, Efektif dan Akuntabel		<p>kinerja) yang akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas Perangkat Daerah yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori yaitu: sangat memuaskan(AA) nilai >90-100), memuaskan(A) nilai >80-90 sangat baik (BB) nilai >70-80, baik (C) nilai >60-70, Cukup (memadai) (CC) nilai >50-60, kurang (C) nilai >30-50, sangat kurang (D) nilai 0-30)</p> <p>Tipe Data : Indeks/ Opini (Skala AKIP) Sumber Data : Hasil Penilaian Inspektorat Kabupaten Purwakarta</p>																										
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala nilai 1(satu) sampai dengan 4(empat).</p> <table border="1" data-bbox="1077 970 1751 1321"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval (NI)</th> <th>Nilai Interval Konversi (NIK)</th> <th>Mutu Pelayanan (x)</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan (y)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00-2,5996</td> <td>25,00-64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60-3,064</td> <td>65,00-76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644-3,532</td> <td>76,61-88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,524-4,00</td> <td>88,31-100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>(PermenPANRB14/2017)</p>	Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)	1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik	2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik	4	3,524-4,00	88,31-100	A	Sangat Baik	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)																									
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik																									
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik																									
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik																									
4	3,524-4,00	88,31-100	A	Sangat Baik																									

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
			<p>Tipe Data : Indeks/ Mutu (Skala IKM) Sumber Data : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Puskesmas</p>	
D.	Sasaran			
		<p>Capaian SAKIP Perangkat Daerah</p>	<p>Formulasi Perhitungan : Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen (perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja) yang akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas Perangkat Daerah yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori yaitu: sangat memuaskan(AA) nilai >90-100), memuaskan(A) nilai >80-90 sangat baik (BB) nilai >70-80, baik (C) nilai >60-70, Cukup (memadai) (CC) nilai >50-60, kurang (C) nilai >30-50, sangat kurang (D) nilai 0-30)</p> <p>Tipe Data : Indeks/ Opini (Skala AKIP) Sumber Data : Hasil Penilaian Inspektorat Kabupaten Purwakarta</p>	

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket																									
		Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala nilai 1(satu) sampai dengan 4(empat).</p> <table border="1" data-bbox="1077 443 1751 791"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval (NI)</th> <th>Nilai Interval Konversi (NIK)</th> <th>Mutu Pelayanan (x)</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan (y)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00-2,5996</td> <td>25,00-64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60-3,064</td> <td>65,00-76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644-3,532</td> <td>76,61-88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,524-4,00</td> <td>88,31-100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>(PermenPANRB14/2017)</p> <p>Tipe Data : Indeks/ Mutu (Skala IKM) Sumber Data : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Puskesmas</p>	Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)	1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik	2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik	4	3,524-4,00	88,31-100	A	Sangat Baik	
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)																									
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik																									
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik																									
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik																									
4	3,524-4,00	88,31-100	A	Sangat Baik																									
E.	Program :																												
1.	Meningkatnya pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi ----- x 100 % Jumlah RS di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026 dan LPPD																									

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
		2. Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ----- x 100 % Jumlah ibu hamil di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026, LPPD dan SPM bidang Kesehatan
		3. Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ----- x 100 % Jumlah ibu bersalin di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026 dan LPPD dan SPM bidang Kesehatan
		4. Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026, LPPD dan SPM bidang Kesehatan

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
		5. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah balita di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026, LPPD dan SPM bidang Kesehatan
		6. Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan standar	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026, LPPD dan SPM bidang Kesehatan
		7. Persentase Orang Usia 15-59 Tahun (Usia Produktif) mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026, LPPD dan SPM bidang Kesehatan

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
		8. Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026, LPPD dan SPM bidang Kesehatan
		9. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026, LPPD dan SPM bidang Kesehatan
		10. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita DM di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026, LPPD dan SPM bidang Kesehatan

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
		11. Persentase ODGJ berat yang mendapatkkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026, LPPD dan SPM bidang Kesehatan
		12. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah penderita TBC yang mendapatkkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita TBC di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026, LPPD dan SPM bidang Kesehatan
		13. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026, LPPD dan SPM bidang Kesehatan

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
		14. Rasio posyandu per satuan balita	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah posyandu ----- x1000 Jumlah balita di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
		15. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----- x100% Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
		16. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----- x100% Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%)</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
			Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	
		17. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Formulasi Perhitungan : Jumlah Desa / Kelurahan UCI ----- x100% Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
		18. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Formulasi Perhitungan : Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----- x100% Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama di Kabupaten Purwakarta Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
		19. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Formulasi Perhitungan : Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun ----- x100% Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama di Kabupaten Purwakarta Tipe Data : Persentase (%)	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
			Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	
		20. Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Formulasi Perhitungan : Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan ----- ----- x100% Jumlah penduduk < 15 tahun di Kabupaten Purwakarta Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
		21. Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Formulasi Perhitungan : Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun ----- ----- x100% Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama di Kabupaten Purwakarta Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
		22. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Formulasi Perhitungan : Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun ----- ----- x100% Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama di Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
			<p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	
		23. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	<p>Formulasi Perhitungan : Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama) ----- x100.000 Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
		24. Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Pasien TB yang meninggal ----- x100.000 Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
		25. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS ----- x100% Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut</p> <p>Tipe Data : Persentase (%)</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
			Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	
		26. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Formulasi Perhitungan : Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun ----- ---- x100% Jumlah Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama di Kabupaten Purwakarta Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
		27. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Formulasi Perhitungan : Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun ----- ----- x100% Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama di Kabupaten Purwakarta Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
		28. Penderita diare yang ditangani	Formulasi Perhitungan : Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun ----- x100% Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
			<p>(10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk) di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	
		29. Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	<p>Formulasi Perhitungan : Banyaknya penduduk usia 15-24 thn yang memakai kondom berhubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir ----- x100%</p> <p>Banyaknya penduduk usia 15-24 tahun yang melakukan hubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
		30. Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS di satu wilayah pada waktu tertentu ----- x100%</p> <p>Jumlah penduduk usia 15-24 tahun di satu wilayah pada waktu yang sama di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%)</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
			Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	
		31. Cakupan kunjungan bayi	Formulasi Perhitungan : Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----- x100% Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama di Kabupaten Purwakarta Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
		32. Cakupan puskesmas	Formulasi Perhitungan : Jumlah puskesmas ----- x100% Jumlah seluruh kecamatan di Kabupaten Purwakarta Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
		33. Cakupan pelayanan nifas	Formulasi Perhitungan : Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----- x100% seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama di Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
		34. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	<p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani ----- x100% Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
		35. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	<p>Formulasi Perhitungan : Pelayanan gawat darurat level 1 ----- x100% Jumlah RS di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
2.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Pemenuhan minimal 9 jenis tenaga Kesehatan	<p>Formulasi Perhitungan : Nilai hasil Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan jumlah Puskesmas dengan minimal 9 tenaga jenis kesehatan -----X 100% Jumlah Puskesmas di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%)</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
			Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	
		2. Persentase ijin praktik tenaga Kesehatan yang diterbitkan	Formulasi Perhitungan : Jumlah ijin praktik yang diterbitkan ----- x 100% jumlah usulan ijin praktik keseluruhan di Kabupaten Purwakarta Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
		3. Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	Formulasi Perhitungan : Jumlah tenaga kesehatan yang tersedia dan memenuhi standar ----- x 100% jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan sesuai standar di Kabupaten Purwakarta Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
		4. Persentase distribusi tenaga Kesehatan sesuai standar kebutuhan	Formulasi Perhitungan : Jumlah distribusi tenaga kesehatan yang tersedia dan memenuhi standar -----x 100% jumlah distribusi tenaga kesehatan yang dibutuhkan sesuai standar di Kabupaten Purwakarta Tipe Data : Persentase (%)	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
			Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	
		5. Rasio dokter per satuan penduduk	Formulasi Perhitungan : Jumlah dokter -----x1000 Jumlah penduduk di Kabupaten Purwakarta Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
		6. Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Formulasi Perhitungan : Jumlah tenaga medis -----x1000 Jumlah penduduk di Kabupaten Purwakarta Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
3.	Meningkatnya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1. Persentase ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan	Formulasi Perhitungan : Jumlah ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan ----- x 100% jumlah usulan ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) keseluruhan di Kabupaten Purwakarta	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
			<p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	
		2. Cakupan sarana farmasi yang dibina	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah sarana farmasi yang dibina ----- x 100% jumlah sarana farmasi keseluruhan di Kabupaten Purwakarta</p> <p>Tipe Data : Persentase (%) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1. Persentase tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang Kesehatan	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah peserta pembinaan/sosialisasi bidang kesehatan tahun n - tahun lalu ----- x 100% Jumlah peserta pembinaan/sosialisasi bidang kesehatan tahun lalu di Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
		2. Persentase pembinaan kader/Lembaga Kesehatan masyarakat yang dibina	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah kader/lembaga kesehatan masyarakat yang dibina ----- x 100% Jumlah kader/lembaga kesehatan masyarakat keseluruhan di Kabupaten Purwakarta</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026
5.	Meningkatnya pemenuhan Penunjang Urusan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	<p>Formulasi Perhitungan : Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen (perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja) yang akan dipergunakan untuk</p>	Dipergunakan untuk pengukuran RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja 2024-2026

No	Uraian	IKU	Penjelasan	Ket
	Pemerintahan Daerah		<p>menentukan tingkat akuntabilitas Perangkat Daerah yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori yaitu: sangat memuaskan(AA) nilai >90-100), memuaskan(A) nilai >80-90 sangat baik (BB) nilai >70-80, baik (C) nilai >60-70, Cukup (memadai) (CC) nilai >50-60, kurang (C) nilai >30-50, sangat kurang (D) nilai 0-30)</p> <p>Type Data : Indeks/ Opini (Skala AKIP) Sumber Data : Hasil Penilaian Inspektorat Kabupaten Purwakarta</p>	



**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA,**



H. Deni Darmawan dr., MARS
NIP 197509132006041008

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN)		TARGET KINERJA (TAHUN)			KONDISI AKHIR (TAHUN)	Penanggung Jawab
			2021	2022	2024	2025	2026	2026	
16	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	98,11	100	100	100	100	100	Kabid Kesmas
17	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	0	77,6	100	100	100	100	Kabid P2P
18	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100	Kabid Kesmas
19	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	85,31	81,05	100	100	100	100	Kabid P2P
20	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Persen	0	20	100	100	100	100	Kabid P2P
21	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	50	37,49	70	80	90	90	Kabid P2P
22	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	92,48	82,2	90	95	100	100	Kabid P2P
23	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Poin	246,95	282,78	245,65	208,52	171,39	171,39	Kabid P2P
24	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Poin	6,07	2,9	2,58	2,26	1,94	1,94	Kabid P2P
25	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	92,48	82,2	90	95	100	100	Kabid P2P
26	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	93,73	86,53	90	90	95	95	Kabid P2P
27	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	Kabid P2P
28	Penderita diare yang ditangani	Persen	100	56,58	85	90	100	100	Kabid P2P
29	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	Rasio	0	0	100	100	100	100	Kabid P2P
30	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	79,4	41,6	80	90	100	100	Kabid P2P

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN)		TARGET KINERJA (TAHUN)			KONDISI AKHIR (TAHUN)	Penanggung Jawab
			2021	2022	2024	2025	2026	2026	
31	Cakupan kunjungan bayi	Persen	100	100	100	100	100	100	Kabid Kesmas
32	Cakupan puskesmas	Persen	100	100	100	100	100	100	Kabid SDK
33	Cakupan pelayanan nifas	Persen	97	100	100	100	100	100	Kabid Kesmas
34	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	75,55	100	100	100	100	100	Kabid Kesmas
35	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100	100	100	100	100	100	Kabid Yankes
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan								
36	Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan	Persen	50	85	30	30	40	40	Kabid SDK
37	Persentase Ijin Praktik Tenaga Kesehatan yang diterbitkan	Persen	68	75,46	30	30	40	40	Kabid SDK
38	Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	68,2	73,5	30	30	40	40	Kabid SDK
39	Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan	Persen	68,2	73,5	30	30	40	40	Kabid SDK
40	Rasio dokter per satuan penduduk	Poin	0,06	0,07	30	30	40	40	Kabid SDK
41	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Poin	0,08	0,1	30	30	40	40	Kabid SDK
III	Program Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Dan Makanan Minuman								
42	Persentase Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan	Persen	100	100	100	100	100	100	Kabid SDK
43	Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina	Persen	70,75	79,67	80	82	85	85	Kabid SDK

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN)		TARGET KINERJA (TAHUN)			KONDISI AKHIR (TAHUN)	Penanggung Jawab
			2021	2022	2024	2025	2026	2026	
IV	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan								
44	Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang kesehatan	Persen	2	4	6	8	10	10	Kabid Kesmas
45	Persentase pembinaan kader/lembaga kesehatan masyarakat yang dibina	Persen	83,4	77,2	89	96	100	100	Kabid Kesmas
V	Program Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
46	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A	A	Sekretaris



**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA,**

H. Deni Darmawan dr., MARS
NIP. 197509132006041008



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KESEHATAN

Jalan : Veteran Nomor : 60 Telepon 206530. 200038. 200039
Fasimile : 200037 Website : dinkes.purwakartakab.go.id
Email : dinkes@purwakartakab.go.id
Purwakarta 41115

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang aktif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan ini :

Nama : **dr. H. DENI DARMAWAN, MARS**
Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA**

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **BENNI IRWAN**
Jabatan : **Pj. BUPATI PURWAKARTA**

Selaku atasan PIHAK KESATU, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai laporan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang perlu dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 04 November 2024

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Purwakarta

BENNI IRWAN

PIHAK KESATU
Kepala Dinas Kesehatan

dr. H. DENI DARMAWAN, MARS
NIP. 19750913 200604 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KESEHATAN

Jalan : Veteran Nomor : 60 Telepon 206530. 200038. 200039Fasimile
: 200037 Website : dinkes.purwakartakab.go.id
Email : dinkes@purwakartakab.go.id
Purwakarta 41115

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Tujuan			
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	71,51
B	Sasaran utama			
	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	1 Umur Harapan Hidup	Tahun	71.51
		2 Cakupan Indeks Pencapaian (IP) SPM Kesehatan	%	100
C	Tujuan			
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
		2 Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik
D	Sasaran utama			
	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
		2 Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik
E	Program :			
1.	Meningkatnya pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan	1 Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	%	50

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100
		3	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100
		4	Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	%	100
		5	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	100
		6	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan standar	%	100
		7	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	100
		8	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100
		9	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	80
		10	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100
		11	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	%	100
		12	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	95
		13	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	80
		14	Rasio posyandu per satuan balita	poin	17
		15	Cakupan kompilkasi kebidanan yang ditangani	%	100

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		16 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100
		17 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100
		18 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100
		19 Persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak	%	100
		20 Non polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	100
		21 Cakupan balita pnumenia yang ditangani	%	70
		22 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	90
		23 Tingkat prevaesnsi tuberkolosis (per 100.000 penduduk)	poin	246
		24 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (Per 100.000 penduduk)	%	2.58
		25 Proposi jumlah kasus Tuberkolosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	90
		26 Proposi kasus Tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	90
		27 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100
		28 Cakupan penderita diare yang ditangani	%	85
		29 Cakupan penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir	%	100
		30 Proposi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	80

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		31 Cakupan kunjungan bayi	%	100
		32 Cakupan Puskesmas	%	100
		33 Cakupan pelayanan nifas	%	100
		34 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100
		35 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana Kesehatan (RS)	%	100
2	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Pemenuhan minimal 9 jenis tenaga Kesehatan	%	85
		2 Persentase ijin praktik tenaga Kesehatan yang diterbitkan	%	80
		3 Persentase kebutuhan tenaga sesuai standar	%	75
		4 Persentase distribusi tenaga Kesehatan sesuai standar kebutuhan	%	78
		5 Rasio dokter per satuan penduduk	Poin	30
		6 Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Poin	30
3	Meningkatnya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1 Persentase ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan	%	100
		2 Cakupan sarana farmasi yang dibina	%	80
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1 Persentase tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat dibidang Kesehatan	%	6
		2 Persentase pembinaan kader/Lembaga Kesehatan masyarakat yang dibina	%	89

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Meningkatnya pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	%	A



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KESEHATAN

Jalan : Veteran Nomor : 60 Telepon 206530. 200038. 200039Fasimile :
200037 Website : dinkes.purwakartakab.go.id
Email : dinkes@purwakartakab.go.id
Purwakarta 41115

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 113.808.335.393	Sumber dana APBD dan DAK Non Fisik
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 13.064.577.000	Sumber dana APBD dan DAK Non Fisik
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp. 590.444.000	Sumber dana APBD dan DAK Non Fisik
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 455.420.000	Sumber dana APBD dan DAK Non Fisik
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 120.054.452.449	Sumber dana APBD
	Jumlah	Rp. 247.973.228.842	Sumber dana APBD dan DAK Non Fisik

Purwakarta, 04 November 2024

Pihak Kedua

BUPA
BUPATI PURWAKARTA

BENNI IRWAN

Pihak Pertama

KEPALA DINAS KESEHATAN

DR. H. DENI DARMAWAN, MARS.
NIP. 19750913 200604 1 008